KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD KABUPATEN JOMBANG DALAM KEGIATAN RESES

(STUDI KASUS DI DAPIL III KABUPATEN JOMBANG)

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)

Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat

Oleh:

Izza Zulhanda Fitri

NIM: E04213042

PROGRAM STUDI FILSAFAT DAN POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini oleh *Izza Zulhanda Fitri* ini telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 11 Oktober 2017

Pembimbing

Dr. BIYANTO, M. Ag.

NIP.197210101019960310 01

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh *Izza Zulhanda Fitri* ini telah dipertahankan di depan

Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 2017

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat

Dekan,

Dr. Muhid, M. Ag.
NIP. 196310021993001002

Tim Penguji:

Ketua,

Dr. Biyanto, M. Ag.
NIP. 197210101019960310 01

Sekertaris ,

M. Anas Fakhruddin, S. Th. I. M. Si
NIP. 198202102009011007

Penguji I

Dr. Ainur Rofiq Al Amin, M. Ag.
NIP. 197206252005011007

Penguji II

Dr. Slamet Muliono Redjosari, M. Si.
NIP. 196811291960310 03

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

NAMA : Izza Zulhanda Fitri

NIM : E04213042

JURUSAN : Filsafat Politik Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, (13-10- 2017)

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

Izza Zulhanda Fitri

E04213042

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : IZZA ZULHANDA FITRI
NIM : E04213042
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT / FILSAFAT POLITIK ISLAM
E-mail address : izulhanda@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD KABUPATEN JOMBANG DALAM KEGIATAN RESES (Studi Kasus Dapil III Kabupaten Jombang).

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Maret 2018

Penulis

(Izza Zulhanda Fitri)

ABSTRAK

Judul : Komunikasi Politik Anggota DPRD Dalam Kegiatan Reses (Studi Kasus Di Dapil III Kabupaten Jombang).

Penulis : Izza Zulhanda Fitri

Pembimbing : Dr. Biyanto, M. Ag.

Skripsi ini berjudul Komunikasi Politik Anggota DPRD Kabupaten Jombang Dalam Kegiatan Reses (Studi Kasus Di Dapil III Kabupaten Jombang). Adapun rumusan masalah penelitian ini yang *pertama,* Bagaimana program anggota DPRD Kabupaten Jombang dalam memanfaatkan kegiatan reses di daerah pemilihan (dapil) III. *Kedua,* Bagaimana anggota DPRD Kabupaten Jombang menjadikan kegiatan reses sebagai media komunikasi politik. Tujuan dari penelitian ini yang *pertama*, untuk mendeskripsikan program kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Jombang di dapil III. *Kedua,* untuk mendeskripsikan komunikasi politik anggota DPRD dalam kegiata reses di dapil III. Teori yang digunakan adalah teori komunikasi politik dalam kegiatan reses dengan pendekatan William Dunn dan A. W. Widjaya, yang mana pendekatan ini melihat komunikasi politik sebagai sebagai suatu sistem pembuatan keputusan yang didasarkan pada berbagai arus informasi, pemerintah sebagai komunikator dari arus informasi tersebut. Hasil temuan penelitian ini adalah ***pertama,*** program dapil III dalam kegiatan reses ini ada dua yang pertama reses yang kedua jasmas sebagai bentuk komunikasi anggota dewan dengan masyarakat. ***Kedua,*** anggota dewan memaksimalkan kegiatan reses ini berbeda-bebeda dalam konteks bentuk komunikasinya dengan masyarakat. meski terdepat beberapa kendala dalam kegiatan reses tersebut anggota dewan memiliki cara setiap invidu dalam melaksimalkan kegiatan reses yang dilakasanakan setiap satu tahun tiga kali tersebut.

Keyword: Komunikasi politik, Anggota Dewan (DPRD), Reses.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL…….…….……..... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ……. ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI ……... iii

PERNYATAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN…… iv

MOTTO …….…... v

PERSEMBAHAN …….…… vi

ABSTRAK ……. viii

KATA PENGANTAR ……..……. x

DAFTAR ISI …….. xii

BAB I : PENDAHULUAN …….. 1

A. Latar Belakang…….……... 1

B. Rumusan Masalah ……..… 7

C. Tujuan Penelitian …… 7

D. Manfaat Penelitian …….…. 8

E. Penelitian Terdahulu…… 8

F. Definisi Konseptual……. 11

G. Metode Penelitian ……... 14

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... 14

2. Lokasi penelitian..... 20

3. Informan Penelitian……... 21

4. Sumber dan Jenis Data..... 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengumpulan Data..... 24

H. Teknik Analisa Data…… 26

I. Teknik Keabsahan Data……. 28

J. Sistematika Pembahasan ……..… 31

BAB II : PERSPEKTIF TEORI……..... 32

A. Konsep Lembaga Legislatif……. 32

B. Komunikasi Politik……..…… 34

C. Reses……..…… 43

BAB III : DESKRIPSI DATA…….. ……. 46

A. Gambaran Umum Kabupaten Jombang…… 46

1. Kondisi Geografis Daerah..... 46

2. Pemerintahan..... 51

3. Sarana pendukung..... 52

B. Demografi Kabupaten Jombang…...……. 54

1. Proporsi Penduduk Menurut Jumlah dan Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan..... 54

2. Komposisi penduduk menurut Pendidikan di Kabupaten Jombang..... 61

BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA…….. 62

A. Program Anggota DPRD Kabuapeten Jombang Dalam Memanfaatkan Kegiatan Reses Di Dapil III...…….. 62

B. Anggota DPRD Kabupaten Jombang Menjadikan Kegiatan Reses Sebagai Media Komunikasi Politik. ……. 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V : PENUTUP ……..... 82

A. Kesimpulan …….….. 82

B. Saran ……. 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses reformasi diawali dengan runtuhnya rezim Soeharto. Era reformasi membawa perubahan mendasar dalam perpolitikan Indonesia. Hal itu membuat tuntutan semakin banyak dari masyarakat kepada pemerintah Indonesia. Dan hal ini disebabkan karena keinginan besar masyarakat untuk memperoleh sesuatu yang baru dibandingkan sebelum reformasi. Pada masa itu dimana masyarakat mengalami pengengkangan dalam kepemimpinan Soeharto khususnya pastisipasi masyarakat yang terbatas. Dalam hal ini usaha untuk melakukan perubahan mutlak harus dilakukan pemerintahan Habibie sebagai pelaksana perubahan dari pemerintahan terdahulu. Salah satu agenda nasional yang harus dijalankan oleh pemerintahan Habibi dalam era reformasi adalah desentralisasi, otonomi daerah dan perubahan politik.[1]

Perubahan politik yang harus dilakukan di era reformasi adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan hingga permasalahan sistem politik yang harus diperbaiki. Demokrasi kepemimpinan Soeharto banyak sekali kritikan dari

[1] Syaukani, Affan Gaffar dan Ryias Rasyid, *Otonomi Daerah Negara Kesatuan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalangan mahasiswa dan masyarakat mengenai pemerintahan Indonesia yang menjadi tantangan di masa Demokrasi kepemimpinan Habibie untuk merubah menjadi demokrasi yang berdaulat.

Menurut Alfian, sebagaimana dikemukakan Rozidetano, suasana yang demokratis akan tercapai atau terpenuhi apabila ada dukungan masyarakat, sedangkan dukungan tersebut akan datang jika anggota masyarakat merasa kehendak-kehendak dan kepentingan-kepentingan mereka mendapat saluran yang baik.[2]

Dari situ masyarakat dapat berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan politik, agar masyarakat merasa bahwa mereka juga memiliki hak untuk memperjuangkan kepentingannya. Salah satu kegiatan penting yang harus diikuti oleh masyarakat adalah pelaksanaan pemilu. Pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi. Pemilihan umum diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat.[3] Negara-negara yang melaksanakan sistem demokrasi, pemilu merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat. Rakyat menjadi pihak yang menentukan dalam proses politik dengan memberikan suara mereka secara langsung. Melalui pemilu yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Rakyat dapat melakukan partisipasi politik dengan jalan

---

[2] Rozidetano P. Hanida, *Bentuk Komunikasi Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Konstituen di Daerah Pemilihannya,* (Skripsi, Tidak Diterbitkan, FISIP, Universitas Andalas). Tersedia di (repository.unand.ac.id > Rozodetano), 2.

[3] Budiarjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, (*Jakarta : PT. Gramedia Pustaka : 2008) 461.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

damai berdasarkan peraturan pemilu yang telah disepakati.[4] Rakyat adalah salah satu elemen penting dalam pemerintahan dan pergantian kepemimpinan nasional. Sehingga harus ada mekanisme yang jelas dalam mengatur kekuasaan rakyat.

Dapat dilihat mekanisme pemilu pada 1999 yang dilakukan secara langsung dan terbuka. Mekanisme pemilihan umum yang digunakan, peserta pemilih secara langsung diarahkan hanya memilih partai mana yang akan dipilih, yang kemudian pengurus partai sendiri yang akan memutuskan siapa yang akan mewakili masyarakat di pemerintahan. Kemudian terjadi perubahan mekanisme pada pemilu 2004 di era Presiden Megawati Soekarno Putri, rakyat sebagai pemilih diberi kesempatan untuk langsung memilih wakilnya untuk duduk sebagai wakil mereka dengan sedikit campur tangan dari partai politik. Hal ini menyebabkan rakyat menjadi elemen penting dalam pemilu terutama partisipasi dalam memilih wakil rakyat. Perubahan ke arah kehidupan yang lebih demokratis mulai berlangsung di Indonesia.

Pemilu tahun 1999 dan pemilu tahun 2004 telah menghasilkan kepemimpinan baru. Lembaga legislatif tidak lagi didominasi oleh partai tunggal, dan proses pengambilan keputusan di DPR berlangsung lebih transparan. Bahkan media dapat meliput rapat-rapat DPR secara langsung dan terbuka. Dengan keadaan itu, masyarakat lebih memahami keberadaan dan

[4]Rozidetano P. Hanida, *Bentuk Komunikasi Politik,* 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan DPR. Di sisi lain, sebagai wakil rakyat anggota dewan diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, anggota dewan menyerap aspirasi masyarakat dengan beberapa cara. Yaitu, anggota dewan menyampaikan aspirasi mewakili masyarakat secara langsung pada saat rapat paripurna, ataupun dengan kunjungan langsung anggota dewan ke lapangan.[5]

Meski telah menempuh beberapa cara, seringkali keputusan yang diambil anggota dewan belum bisa mencerminkan aspirasi masyarakat. Hal ini mencerminkan belum efektifnya informasi yang berasal dari masyarakat sebagai sebuah masukan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan publik. Penjaringan aspirasi masyarakat perlu lebih diefektifkan dengan melibatkan anggota dewan secara langsung.

Salah satu yang dilakukan oleh anggota dewan adalah mengefektifkan kegiatan reses dengan cara berdialog dengan masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Melalui reses, para wakil rakyat yang bersidang di gedung milik rakyat dapat mengetahui secara lebih detail kondisi masyarakat di daerahnya, sehingga pelaksanaan program serta evaluasi pembangunan dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, reses juga dilakukan untuk memaksimalkan kinerja anggota dewan.

Hal ini dilakukan sebagai langkah tanggung jawab setiap wakil rakyat di daerah pilihan masing-masing. Dengan cara berkomunikasi dan menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing, serta berusaha memperjuangkan aspirasi dari masyarakat dalam bentuk anggaran. Serap aspirasi masyarakat merupakan

[5] Budiarjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* 483.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agenda rutin dari setiap anggota dewan yang disebut dengan masa reses. Masa reses ini merupakan bentuk komunikasi anggota dewan pusat (Republik Indonesia), Provinsi, hingga Kabupaten/Kota. Tujuan dari reses terebut untuk mendekatkan wakil rakyat dengan rakyat yang sudah memilihnya, reses juga menjadi sesuatu yang ditunggu para wakil rakyat, yang juga menjadi waktu istirahat, masa reses dapat dimanfaatkan untuk bertemu keluarga jauh maupun dekat di kampung halaman dan reses dimanfaatkan untuk bertemu dengan masyarakat di daerah pemilihannya.

Berbicara serap aspirasi dalam kegiatan reses. Peneliti melihat fenomena kegiatan komunikasi politik anggota DPRD dapil III Kabupaten Jombang, yang meliputi Kecamatan Mojoagung, Mojowarno, Wonosalam, dan Bareng. Dalam prosedurnya kegiatan komunikasi politik anggota dewan, pada masa reses dilakasanakan setiap satu tahun tiga kali. Setiap anggota dewan memiliki cara yang berbeda-beda dalam setiap melakukan komunikasi politiknya.

Kegiatan reses ini untuk mendengar aspirasi masyarakat sehingga setiap anggota dewan harus memaksimalkan bagaimana komunikasi yang tepat. Dari berbagai aspirasi masyarakat yang sudah dipaparkan disetiap kegiatan reses, akan menjadi sebuah kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tidak sedikit aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada wakilnya, yang itu juga akan menjadi sebuah pertanyaan tersendiri bagi masyarakat.

Dalam kegiatan reses kabupaten jombang terdapat perubahan prosedur yang baru di keluarkan, yaitu semua anggaran dan ketentuan titik daerah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan dikunjungi berada di tangan Sekertaris Dewan (Setwan). Sekertaris Dewan menurunkan surat kepada setiap titik, setelah itu melakukan registrasi kepada setiap titik daerah yang ditentukan, undangan disebarkan sampai sekitar 80 masyarakat. menyebabkan kurang efektifnya pelaksaan reses menurut anggota dewan Kabupaten Jombang, hal ini menjadi permasalah dalam melakukan kegiatan reses, yang membuat kegiatan reses atau serap aspirasi masyarakat terhambat. Seperti yang dinyatakan Fatah kepada wartawan bahwa "ada sejumlah modus kegiatan reses fiktif oleh anggota DPRD Jombang yang disebutnya sebagai perilaku tindak pidana korupsi. Modusnya beragam, mulai dari manipulasi laporan kehadiran peserta kegiatan, manipulasi laporan keuangan, dan modus lainnya."[6]

Dengan latar belakang yang terjadi di DPRD Kabupaten Jombang, tidak sedikit yang harus diurai di dalamnya. Namun peneliti memfokuskan pada komunikasi politik anggota DPRD kepada konstituennya, yang juga terhambat karena dana yang tidak sesuai menurut anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan reses tersebut. Melihat keefektifan dari serap aspirasi masyarakat yang akan dijadikan kebijakan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Yang sudah menjadi hak masyarakat untuk mengetahui hasil dari serap aspirasi masyarakat tersebut. Karena timbulnya masalah dalam kegiatan reses yang sudah di terangkan, masyarakat juga tidak banyak mengetahui apa sebenarnya reses itu

[6] Okezone.com (pada hari Jumat tanggal 22 April 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan apa tujuan dari reses itu juga perlu diperhatikan anggota DPRD di dalam komunikasi politiknya. Karena penting bagi masyarakat yang lain juga untuk mengeluarkan aspirasinya selain dari masyarakat yang biasa diundang dalam kegiatan reses tersebut. Dari masalah yang sudah dijelaskan diatas peneliti tertarik mengangkat topik "Komunikasi Politik Anggota DPRD Dalam Kegiatan Reses (Studi Kasus di Dapil III Kabupaten Jombang)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka untuk memfokuskan kajian masalah pada penelitian ini, dirumusan masalah dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana program anggota DPRD Kabupaten Jombang dalam memanfaatkan kegiatan reses di daerah pemilihan (dapil) III?
2. Bagaimana anggota DPRD daerah pemilihan (dapil) III Kabupaten Jombang menjadikan kegiatan reses sebagai media komunikasi politik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka Tujuan Penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mendeskripsikan program kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Jombang di dapil III.
2. Untuk mendeskripsikan komunikasi politik anggota DPRD dalam kegiatan reses di dapil III.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman akan proses kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Jombang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak anggota DPRD Dapil III Kabupaten Jombang.

E. Penelitian Terdahulu

Ada dua penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:

1. Penelitian Efektifitas Reses Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode 2009-2014 (Studi Dapil I Kecamatan Bantan, Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Rupat, dan Kecamatan Rupat Utara), oleh Qory Kumala Putri dan M. Y. Tiyas Tinov. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif(campuran) yang menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner, wawancara, dan dokumentasi menggunakan teknik *purposive sampling*. Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa: Reses anggota DPRD Kabupaten Bengkalis efektif dilakukan dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihnya. Hal ini dapat diketahui dari hasil pengukuran yang penulis lakukan dengan menggunakan skala *liker*, dimana jumlah skor yang diperoleh dari penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah 957 atau 68,36%, dari yang diharapkan yaitu 100%. Tindakan-tindakan yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis khususnya Daerah Pemilihan I dalam merealisasikan setiap aspirasi masyarakat, yaitu: (1) Anggota dewan akan membuat laporan hasil reses untuk disampaikan kepada Bupati Kabupaten Bengkalis dan Dinas yang berwenang sesuai dengan aspirasi masyarakat, (2) Anggota dewan mengusulkan aspirasi atau permohonan masyarakat pada sidang paripurna penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis, dan (3) Anggota dewan melakukan lobi-lobi politik dengan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya agar menyetujui aspirasi masyarakat yang ditampungnya saat reses.[7]

Perbedaan penelitian ini dengan masalah yang akan diteliti ialah penelitian ini lebih berfokus pada efektifitas reses terhadap masyarakat, sedangkan penelitian reses dan kebijakan pemerintah ini ingin melihat efektifitas reses terhadap kebijakan pemerintah. Dan komunikasi politik dua arah yang dilakukan anggota DPRD. Selain itu metode penelitian dan lokasi penelitian juga berbeda, dimana pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu kualitatif dan kuantitatif, berlokasi di kab. Bengkalis, sedangkan pada masalah yang akan diteliti menggunakan metode kualitatif dan berlokasi di Kabupaten Jombang pada Dapil III.

[7] Qory K. Putri, M. Y. Tiyas Tinov, *"Efektifitas Reses Anggota DPRD Kab. Bengkalis Periode 2009-2014 (Studi Dapil I Kecamatan Bantan, Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Rupat,dan Kecamatan Rupat Utara)"* Jurnal Online Mahasiswa Vol 1, No. 1 (Februari 2014), (Artikel Online) 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penelitian kedua, "Kinerja DPRD dalam melaksanakan kekuasaan legislasi *(Studi Di DPRD Kota Malang)*" oleh Sofyan Arief, SH. Metode penelitian ini adalah diskriptif dengan metode pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan berkaitan dengan kinerja DPRD Kota Malang dalam melaksanakan fungsi legislasi.

Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa pemahaman DPRD Kota Malang terhadap legislasi masih kurang meskipun sudah beberapa kali dilakukan pelatihan-pelatihan Legal Drafting baik yang dilakukan di tingkat pusat, propinsi maupun Daerah, perubahan konstitusi yang kemudian diikuti dengan perubahan beberapa peraturan perundang-undangan tidak berdampak pada peningkatan produktivitas DPRD dalam memproduk Rancangan Peraturan Daerah. Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang dalam melaksanakan kekuasaan Legislasi setelah berlakunya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak menunjukkan mempunyai semangat perubahan ke arah yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya.

DPRD Kota Malang selain tidak pernah menggunakan hak inisiatif untuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah, juga tidak mempunyai inisiatif untuk mensosialisasikan dan melibatkan rakyat dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.Dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, DPRD Kota Malang lebih banyak hanya mengikuti skenario kepentingan Pemerintah Kota Malang yang hanya ingin mendongkrak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi.[8]

Perbedaan penelitian ini dengan masalah yang akan diteliti yaitu Penelitian ini hanya membahas mengenai Kinerja DPRD dalam fungsi legislasi secara umum saja, sedangkan pada masalah yang akan diteliti lebih spesifik kepada komunikasi politik dua arah dan hasil dari kegiatan reses yang sudah di lakukan, bagaimana program direalisasikan.

F. Definisi Konseptual

1. Komunikasi politik

Komunikasi itu adalah pengalihan informasi untuk memperoleh tanggapan, saling berbagi informasi, gagasan atau sikap. Atau suatu peristiwa yang dialami secara internal, yang murni antar personal yang saling bertukar pikiran atau gagasan, informasi, dan yang lainnya yang di bagi dengan orang lain atau antar personal itu sendiri. Komunikasi juga bisa didefinisikan sebagai suatu proses interaksi sosial yang di gunakan orang untuk menyusun makna yang merupakan citra mereka mengenai dunia, dimana itu berdasarkan dari apa yang telah mereka lakukan. Dan untuk bertukar citra itu melalui simbol-simbol. Sedangkan politik itu juga seperti komunikasi, politik akan selalu melibatkan pembicaraan. Didalam berpolitik akan banyak sekali perselisihan, konflik yang di timbulkan dari antar

[8] Sofyan Arief, SH, "*Kinerja DPRD Dalam Melaksanakan Kekuasaan Legislasi (Study Di DPRD Kota Malang)"* Jurnal Legality Vol 20 No.2, (Artkel Online) hal 3, di terbitkan dalam *ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/300/313*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

individu, atau pun kelompok, apabila seseorang mengamati konflik akan timbul sebagai perselisihan, ada yang pro dan ada yang kontra. Yang itu bisa disebut juga sebagai komunkasi, sehingga komunikasi dan politik sangat berkaitan.[9]

Dewan Perwakilan Rakyat (Badan legislatif), Badan legislatif atau *legislature* mencerminkan salah satu fungsi dari badan itu sendiri yaitu legislasi (membuat undang-undang). Nama lain yang digunakan yaitu *Asesembly* yang mengutamakan unsur berkumpul (untuk membicarakan masalah-masalah publik. Ada istilah lain yaitu *parliament*, suatu istilah yang menenkankan untuk "bicara" (*parler*) dan merundingkan. Badan legislatif mengutamakan representasi atau keterwakilan anggota-anggotanya yang dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tetapi apa pun perbedaan namanya dapat dipastikan bahwa badan ini merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat. Apa pun keputusan yang di ambil oleh badan legislatif ini merupakan suara yang paling benar. Karena, keputusan-keputusan baik yang bersifat kebijakan maupun undang-undang mengikat seluruh rakyat.[10] Badan legilatif ini meliputi MPR, DPR, DPD.

2. Masa Reses

Reses adalah masa dimana anggota DPR/DPRD berhenti masa sidangnya, untuk kunjungan ke daerah pilihanya masing-masing dalam

[9] Nimmo Dan, *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, Dan Media,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 5-8.
[10] Budiharjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* 315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurun waktu yang sudah ditentukan, guna untuk menyerap aspirasi masyarakat yang nanti akan menjadi laporan anggota dewan memepertahankan hak masyarakat demi kesejateraan masyarakat itu sendiri. Di akhir masa reses nya yang akan akan di buka kembali masa sidangnya untuk pelaporan hasil reses masing-masing anggota dewan.

3. Daerah Pemilihan (Dapil)

Dapil dalam UU Nomor 12/2003 Bab V, pasal 46 merupakan provinsi atau bagian-bagian provinsi untuk untuk DPR-RI, Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota untuk DPRD-Provinsi dan Kecamatan untuk DPRD Kabupaten/Kota. Setiap dapil mendapatkan alokasi kursi tertentu, yang jumlahnya baik secara provinsi maupun Kabupaten/kota telah ditetapkan oleh UU, dengan ketentuan sebagai berikut:

> "Dapil untuk pemilihan DPR-RI mendapatkan alokasi anatara 3-12 kursi, dalam pasal 46 ayat 2. Sedangkan untuk pemilihan DPRD-Provinsi alokasinya juga antara 3-12 kursi dengan jumlah secara provinsial (untuk tiap provinsi), ditetapkan melalui batasan jumlah penduduk. Hal ini berlaku sama untuk pemilihan DPRD-Kabupaten/Kota, di dalam pasal 49 dan 50 UU No. 12 Tahun 2013. Dan untuk pemilihan DPD ditetapkan scara provinsial dengan alokasi sebanyak 4 kursi setiap provinsi, di dalam pasal 51 dan 52."

UU No. 12 Tahun 2003 juga menegaskan bahwa penetapan Dapil anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditentukan oleh KPU dengan ketentuan setiap dapil mendapatkan alokasi kursi sebanyak 3-12 kursi, yang artinya baik Dapil maupun alokasi kursi untuk setiap Dapil ditentukan oleh KPU dan tidak ditetapkan melalui UU. Undang-undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya menetapkan jumlah keseluruhan dan alokasi secara nasional, seperti yang dijelaskan dalam UU No. 12 Tahun 2003 Pasal 47 yang menjelaskan tentang alokasi kursi untuk setiap DPRD.[11]

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul "Komunikasi Politik Anggota DPRD Kabupaten Jombang Dalam Kegiatan Reses (Studi Kasus Dapil III Kabupaten Jombang)", adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana metode pendekatan kualitatif yang secara sederhana dapat dijelaskan bahwa metode ini menggunakan keterangan dari informan sebagai subjek. Beberapa informan yang sudah ditentukan untuk memperkuat data dari sebuah penelitian dalam komunikasi politik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif karena penyajian data tidak dilakukan dengan mengungkapkannya secara *numeric* sebagaimana penyajian data secara kuantitatif. Sehingga dalam penelitian komunikasi politik ini hanya disajikan dalam bentuk deskriptif atau narasi.

Dalam pendekatan ini peneliti terjun langsung ke Kabupaten Jombang yang hanya di ambil sebagaian wilayah jombang yaitu wilayah Mojoagung, Mojowarno, Wonosalam, Bareng sebagian yang merupakan lokasi penelitian

[11] http://www.academia.edu/6042949/Sistem_Pemilu_dan_Pembagian_Dapil_yg_Ideal_-_Totok_Daryanto (diakses pada hari Minggu, 24 September 2017, Pukul 19.13 WIB).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Peneliti mendatangi DPRD sesuai dengan dapil yang sudah ditentukan sebagai studi kasus dari penelitian komunikasi politik.

Dalam penelitian ini mencari data langsung dengan melakukan wawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan kepada anggota dewan yang sudah ditentukan sebagai informan atau melakukan percakapan terhadap orang-orang yang bersangkutan, seperti masyarakat yang menghadiri kegiatan reses. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena pada permasalahan mengenai komunikasi politik kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Jombang, ingin lebih tahu komunikasi politik dalam kegiatan reses anggota DPRD Dapil III Kabupaten Jombang. Sehingga tidak memungkinkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen berupa angket. Karena pada permasalahan kali ini sangat tepat kiranya jika menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memahami masalah fenomena-fenomena sosial yang terjadi.

Dari sisi metodeologis, tata cara mengungkapkan pemikiran seseorang atau pandangan kelompok orang adalah dengan menggunakan penelitian secara kualitatif. Untuk mengungkapkan pemikiran seseorang secara metodeologis, peneliti melakukan beberapa tahap agar bisa mendapatkan data yang sesuai, antara lain;

a. Menyusun pertanyaan yang akan diwawancarakan kepada setiap informan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menentukan informan yang bersangkutan dalam tema yang akan diteliti.

c. Membuat janji wawancara dengan setiap informan .

d. Menemui setiap informan. Dan informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang benar-benar mengetahui informasi dan mempunyai jawaban dari apa yang akan ditanyakan oleh peneliti.

e. Dan melakukan wawancara dengan setiap informan.

Ada delapan informan yang ditentukan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini yaitu empat anggota DPRD Kabupaten Jombang, dua Sekertaris dewan, dan dua Konstituen. Dan untuk mengungkap pemikiran-pemikiran delapan informan tersebut dalam penelitian komunikasi politik anggota DPRD Kabupaten Jombang ini. Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut;

a. Anggota DPRD dapil III Kabupaten Jombang (Ikhnan, Muhaimin, Saichu, Totok)

1. Bagaimana tingkat partisipasi konstituen ketika kegiatan reses berlangsung?
2. Bagaiamana cara anggota dewan memaksimalkan komunikasi dengan masyarakat dikegiatan reses?
3. Setelah melakukan kegiatan reses, langkah apa yang diambil anggota dewan terhadap semua aspirasi yang disampaikan oleh konstituen tersebut?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bagaiamana proses anggota dewan mewujudkan tuntutan masyarakat?
5. Dalam serap aspirasi dengan konstituen, apakah anggota dewan melakukan serap aspirasi hanya dikegiatan reses?
6. Apakah partisipasi konstituen dalam kegiatan reses ini orang-orang yang biasa diundang atau merata?
7. Selama ini program apa saja yang sudah terealiasi dari berbagai aspirasi masyarakat tersebut?
8. Apa kendalanya dalam melakukan kegiatan reses?
9. Bagaimana cara anggota dewan mengatasi kendala-kendala tersebut?

b. Sekertaris dewan

1. Menurut sekertaris dewan reses itu bagaimana?
2. Kapan dimulainya kegiata reses?
3. Berapa anggaran untuk setiap kegiatan reses?
4. Untuk anggaran, apakah anggaran tersebut juga untuk fraksi?
5. Apa kewenangan setwan dalam kegiatan reses ini?

c. Konstituen

1. Apa yang saudara ketahui tentang reses?
2. Berapa kali saudara menghadiri reses anggota dewan?
3. Selama anda menghadiri kegiatan reses, apakah konstituen yang hadir ada perubahan atau tetap hanya ornag-orang yang sama?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Apa yang anda dapatkan dalam setiap kegiatan reses?
5. Berapa anggota dewan yang pernah reses di daerah ini?
6. Apa perbedaan anggota dewan satu dengan yang lainnya pada saat kegiatan reses atau setelah kegeitan reses?
7. Apakah setiap anggota dewan yang melakukan komunikasi dengan konstituen sudah maksimal dan sesuai dengan keinginan masyarakat?
8. Bagaimana kinerja anggota dewan dan apa hasil yang sudah dirasakan oleh konstituen dari pemerintah?

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih dua bulan untuk mendapatkan data yang valid. Melakukan wawancara dengan setiap konstituen dan mendatangi konstituen satu persatu, agar dapat lebih maksimal untuk menggali data. Setetelah melakukan wawancara dan mendapatkan jawaban-jawaban dari setiap hasil pemikiran informan yang sudah disampaikan. Maka selanjutnya peneliti mengolah data-data secara tertulis dan terstruktur sesuai dengan tema penelitian.

Dari proses tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bodgan dan Taylor dalam Basrowi yang mendefinisikan metodelogi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Individu dipandang sebagai bagian dari suatu keutuhan, bukan sebagai variabel atau hipotesis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus, dimana penelitian ini memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail. Dalam hal ini penentuan judul komunikasi politik anggota DPRD Kabupaten Jombang dalam kegiatan reses, agar tidak mencakup terlalu luas dalam melakukan peneltian dan mempermudah mecari ke validan data, maka peneliti memusatkan penelitian pada satu tempat yang dianggap sangat pantas untuk dijadikan pusat yang akan diteliti atau dengan maksud lain adalah studi kasus yang mana data Subjek yang diteliti terdiri dari satu unit atau satu kesatuan unit yang dipandang sebagai kasus. Dari tema penelitian tersebut, maka peneliti mengambil studi kasus di Dapil III Kabupaten Jombang, sebagai pusat atau fokus dari wilayah penelitian.

Pada penelitian itu bermacam-macam jenisnya, dan dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan, metode, tingkat eksplanasi, dan analisis jenis data. Dalam hal ini penelitian yang dilaksanakan adalah berupa penelitian yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif analisis yaitu metode dimana penulis mengumpulkan data-data seperti yang sudah dipaparkan diatas yaitu wawancara dengan informan-informan yang bersangkutan dalam tema penelitian ini, selain itu penelitian yang diperoleh juga dari objek penelitian dan literatur-literatur lainnya. Kemudian menguraikan secara rinci untuk mengetahui permasalahan penelitian dan mencari penyelesaiannya.[12]

[12] Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD* (Bandung: Alfabeta 2010), 218-219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan, metode deskriptif kualitatif yang berbasis studi kasus yaitu penelitian yang dimaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, presepsi, motivasi dan tindakan dan dengan cara deskripsi melalui kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai macam metode alamiah.[13]

2. Lokasi Penelitian

Berangkat dari timbulnya keinginan untuk meneliti komunikasi politik anggota dewan. Maka, dalam penelitian ini mengambil lokasi beberapa kecamatan dari Kabupaten Jombang yang secara administratif terdiri atas 21 Kecamatan. Yang dijadikan lokasi penelitian antaranya yaitu Mojoangung, Mojowarno, Bareng, Wonosalam sebagai objek penelitian. Mojoagung mempunyai 18 kelurahan dan 75 dusun, Mojowarano 19 kelurahan dan 68 dusun, Wonosalam 9 kelurahan 48 dusun, Bareng 13 kelurahan dan 50 dusun. Dengan keadaan geografis Kabupaten Jombang yang terletak membentang antara 7.20' dan 7.45' Lintang Selatan, 5.20° - 5.30° Bujur Timur, dengan Luas Wilayah 115.950 Ha : 1.159,5 Km^2. Batas-batas wilayah kabupaten jombang antaranya yaitu:

a. Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan
b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri
c. Sebelah Timur : Kabupaten Mojokerto
d. Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk.

[13] Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Mojoagung, Mojowarno, Wonosalam dan Bareng saling berjajaran yang terletak di sebelah timur Kabupaten Mojokerto yang merupakan perbatasan Jombang-Mojokerto.

Alasan peneliti memilih lokasi ini sebagai objek peneitian yaitu:

a. Karena Kabupaten Jombang merupakan salah satu Kabupaten yang tidak melakukan kegiatan reses pada tahun 2017, sejak ada LSM yang turun aksi karena kegiatan reses yang menurut LSM tersebut bermasalah.
b. Anggota dewan yang memberhentikan sementara kegiatan reses tersebut karena alasan tertentu.
c. Masyarakat yang memiliki sedikit pengetahuan mengenai kegiatan reses.

3. Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* atau sampling bertujuan. Sampling bertujuan adalah suatu strategi jika seseorang menginginkan agar dapat memahami sesuatu mengenai kasus-kasus terpilih tertentu tanpa membutuhkan (atau berhasrat) untuk mengeneralisasi kepada semua kasus seperti itu. Peneliti menggunakan *purposive sampling* untuk meningkatkan kegunaan informasi yang diperoleh dari sampel yang sedikit. Sampling bertujuan membutuhkan informasi yang diperoleh atau diketahui itu dalam fase penghimpunan data awal mengenai variasi di antara sub-sub unit sebelum sampel dipilih. Peneliti pada mulanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menelusur informan, kelompok-kelompok, tempat-tempat, atau peristiwa-peristiwa kunci yang mempunyai informasi yang kaya dari mereka, sub-sub unit dipilih untuk kajian yang lebih dalam. Dengan perkataan lain, sampel-sampel ini dapat dipilih karena merekalah agaknya yang mempunyai pengetahuan banyak dan informatif mengenai fenomena yang sedang diinvestigasi oleh peneliti, sehingga dalam menentukan informasi penelitian, penulis memilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut bedasarkan kedudukannya dalam negara.

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informasi ini dibutuhkan untuk mengetahui komunikasi politik anggota DPRD kabupaten Jombang dalam kegiatan reses anggota dewan di daerah pilihannya tahun 2015-2016, berikut beberapa informan yang dimintai data informasi sesuai judul, yaitu:

a. Ikhnan selaku anggota dewan dapil III dari Fraksi HANURA.
b. Muhaimin selaku anggota dewan dapil III dari Fraksi PKB.
c. Totok Hadi Riswanto selaku anggota Dewan dapil III dari Fraksi PDI-P.
d. H. Saichu anggota dewan dapil III dari Fraksi PAN.
e. Pinto Widiarto selaku ketua sekertaris Dewan Kabupaten Jombang.
f. Gangsar Agung Kepala Bagian persidangan sekertaris DPRD Kabupaten Jombang
g. Widiyanti konstituen reses.
h. Suyadi konstituen reses.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama dan kebutuhan mendasar dari penelitian ini. Sumber data diperoleh dari informan saat peneliti terjun langsung ke lapangan tempat penelitian. Beberapa informan akan dipilih berdasarkan kebutuhan penelitian, yang berkaitan dengan tema penelitian. Informan adalah orang yang bisa memberikan informasi tentang situasi dan juga kondisi latar penelitian.[14] Informan bukan hanya sebagai sumber data, melainkan juga aktor pelaku yang menentukan berhasil atau tidak penelitian berdasar hasil informasi yang diberikan.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. Data sekunder merupakan data pendukung dan pelengkap dari data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dengan cara dokumentasi dalam pengumpulan data. Data sekunder adalah data penunjang sumber utama untuk melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari hal-hal yang diberkaitan dengan penelitian, antara lain

[14] Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buku, jurnal, artikel, koran, browsing data internet, dan juga berbagai dokumentasi pribadi maupun resmi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Hal yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan tugas adalah perlu mendapatkan data-data yang akan dianalisis. Beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Metode wawancara merupakan alat bukti terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan. Dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Seperti dalam peneilitian komunikasi politik anggota DPRD Kabupaten Jombang dalam kegiatan reses (studi kasus di Dapil III Kabupaten Jombang). Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang sudah ditentukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara mendetail dan berulang sebagai bentuk wawancara mendalam dari teknik pengumpulan data tersebut.

Wawancara juga bisa didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti untuk mendengarkan pendapat dan keyakinan isi yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, wawancara dilakukan untuk memperoleh pengetahuan tentang makna makna subyektif yang dipahami individu mengenai topik yang diteliti dan untuk melakukan eksplorasi terhadap hal tersebut.[15]

Pada penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah dengan wawancara terbuka. Wawancara terbuka merupakan wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya, artinya pertanyaan yang mengundang jawaban terbuka. Wawancara seperti ini memiliki kelebihan dari segi kekayaan data, akan tetapi sulit untuk mengklasifikasikan jawaban yang diajukan. Wawancara jenis ini lebih banyak dipergunakan dalam penelitian kualitatif yang menuntut lebih banyak informasi apa adanya tanpa intervensi peneliti.[16]

Wawancara dilakukan dengan terstruktur, sehingga sebelum melakukan wawancara, peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk membimbing peneliti dalam mendalami pemahaman yang dilakukan pada saat wawancara. Adapun di dalamnya, topik wawancara akan bisa mengalir sesuai rancangan pertanyaan yang

[15] E. Kristi Purwandari, *Pendekatan Kualitatif Untuk Manusia* (Jakarta: LPSP3, 2005), 127.
[16] Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah disiapkan.[17] Pada wawancara informan akan diarahkan pada fokus terkait pemahaman mengenai bagaimana komunikasi politik anggota DPRD dapil III Kabupaten Jombang dalam kegiatan reses.

2. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Adapun data yang terlampir seperti surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artifek, foto, dan sebagainya. Sifat utama yang data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.

H. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Moelong mendefinisikan analisis data sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja sebagaimana yang disarankan oleh data.[18]

Penelitian ini menggunakan model analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga hal utama/alur kegiatan yang akan

[17] Nasution, *Metode Research*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 1996), 17-119
[18] Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Rake Sarasin, 1996) 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan dari awal hingga selesai, yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam model analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

   Reduksi data adalah proses pemilihan atau pemfokuskan suatu penelitian dan menyeleksi setiap data yang didapatkan di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dan sedang dilakukan. Dengan demikian, proses reduksi data bertujuan untuk memilah setiap data yang didapatkan agar lebih terarah dan terstruktur. Reduksi data ini di gunakan peneliti setelah memilih tema, yang akan difokuskan dalam sebuah penelitian.

   Peneliti melakukan berkali-kali wawacara dengan beberapa nforman untuk mendapatkan data setelah mefokuskan penelitian tersebut dan data yang dicari dalam penelitian ini. Dari data-data tesebut yang berupa teks maupun dokumentasi yang didapatkan akan di golongkan dalam bentuk data yang valid, yang mana data tersebut sudah dipilah dan diarahkan sesuai dengan jawaban rumusan masalah yang sudah difokuskan. Reduksi data ini dilakukan oleh peneliti dari awal observasi dalam penentuan tema hingga kevalidan data yang sudah terverifikasi.

2. Penyajian Data

   Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakan. Dalam penyajian data, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya, setelah proses reduksi selesai dilakukan, peneliti menyajikan data secara terstruktur.

3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Peneliti mengintrerpretasi data yang telah tersaji, kemudian merumuskan pola dan tema, melihat data dan mencoba mereduksinya kembali, sehingga proses ini merupakan proses yang interaktif.

I. Teknik Keabsahan Data

Pada langkah ini penetapan dari keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan pelaksanaan. Teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ketajaman analisis peneliti dalam menyajikan sebuah data tidak menjadikan hasil hasil temuan peneliti memiliki keakuratan data. Perlu melewati pengujian data terlebih dahulu sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan sebagai seleksi akhir dalam menghasilkan temuan.[19]

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data atau informasi daripada sikap dan jumlah orang. Pada dasarnya uji keabsahan data dalam sebuah penelitian, hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian ini peneliti memakai keabsahan data sebagai berikut:

[19] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti memastikan data yang di lapangan benar-benar terkumpul dengan menambah studi penelittian di lapangan. Hal ini dilakukan bertujuan agar tidak ada kekliruan pada penelitian atau tulisan sehingga data yang diperoleh akan lebih valid. Namun langkah ini memungkinkan peneliti untuk kembali ke lokasi penelitian dengan memerlukan waktu yang lumayan lama.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan disini berarti teknik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan ketekunan peneliti dalam kegiatan pengamatan. Ketekunan merupakan sikap mental yang disertai dengan ketelitian dan keteguhan di dalam melakukan pengamatan untuk memperoleh data penelitian. Pengamatan merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis (mata, dan telinga) serta psikologis (daya adaptasi yang didukung oleh sifat kritis dan cermat).[20]

3. Trianggulasi

Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan data dari berbagai sumber dengan berbagai sumber

[20] Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju 1990), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangguialasi sumber, teknik, dan waktu.

a. Trianggulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif, hal tersebut dapat dicapai dengan mebandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan juga perlu dilakukan, serta perlunya membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen terkait.
b. Trianggulasi dengan metode. Hal ini dimaksudkan dengan menggunakan metode dengan cara melakukan perbandingan, pengecekan kebenaran dan kesesuaian data penelitian melalui metode yang berbeda. Terdapat dua strategi yaitu:[21]
   a. Pengecekan derajat kepercayaan menemukan hasil penelitian dengan beberapa tenik pengumpulan data.
   b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Pada penelitian ini, akan dilakukan hal dengan membandingkan data antara di lapangan dengan luar lapangan, dengan perbandingan ini akan memungkinkan peneliti lebih mengetahui apakah data tersebut valid atau tidak.

[21] Husaini, Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena disini peneliti akan memilih data yang akan dijadian laporan yang berikutnya akan dimasukan ke dalam laporan penelitian.

J. Sistematikan Pembahasan

Mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap suatu penelitian, maka hasil penelitian ini :

Bab I adalah Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II, Kerangka Konseptual Dan Teori. Dalam bab ini Kerangka Teori terdiri dari teori komunikasi dan kebijakan publik.

Bab III, Metode Penelitian. Sebagai Acuan kegiatan penelitian, gambaran umum memuat jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, informasi penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknis analisis data.

Bab IV, Penyajian Data. Memaparkan hasil penelitian dan pembahasannya Komunikasi Politik Anggota DPRD Kabupaten Jombang Dalam Kegiatan Reses (Studi Kasus Dapil III Kabupaten Jombang).

Bab V Analisa Data. Berisi analisa data yaitu memaknai hasil penelitian tentang Komunikasi Politik Anggota DPRD Kabupaten Jombang Dalam Kegiatan Reses (Studi Kasus Dapil III Kabupaten Jombang).”

Bab VI Penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Pada bagian terakhir daftar pustaka dan lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERSPEKTIF TEORI

A. Konsep Lembaga Legislatif

Menurut Miriam Budiharjo, parlemen yang berada di daerah atau yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebuah Lembaga Perwakilan Rakyat di daerah. Anggota DPRD dipilih langsung oleh masyarakat pada saat pemilihan umum (Pemilu). DPRD terbagi atas dua, yaitu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Fungsi dari DPRD sama dengan fungsi DPR, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.[1]

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Pasal 40, menjelaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sementara itu, Pasal 42 ayat (1) menjelaskan tugas dan wewenang DPRD meliputi beberapa hal, yaitu:[2]

a. Membentuk peraturan daerah (perda) yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
b. Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah.
c. Melaksanakan pengawasan tentang pelaksanaan perda, dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD,

[1] Budiarjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, (*Jakarta : PT. Gramedia Pustaka : 2008), 322.
[2] Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah Pasal 40 dan pasal 42 ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.

d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD propinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota.

e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatanwakil kepala daerah.

f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.

g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah.

h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepada daerah dalam menyelengarakan pemerintahan daerah.

i. Membentuk panitia pengawasan pemilihan kepala daerah.

j. Memberikan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.

k. Memberi persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Menurut Muslimah Hanim, sebagaimana yang dikemukakan Qary kumala yang dimaksud dengan perwakilan (*refresentative*) adalah konsep bahwa seseorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk membicarakan dan bertindak atas nama suatu kelompok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lebih besar. Saat ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik hal ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik (*political refresentative*).[3]

Muslimah Hanim menjelaskan bahwa pada umumnya perwakilan politik mempunyai kelemahan karena yang terpilih biasanya adalah orang-orang populer kerena repotasi politiknya, akan tetapi belum tentu mempunyai kemampuan serta menguasai masalah-masalah teknis pemerintah, perekonomian, dan lain sebagainya. Sedangkan para ahli dalam bidang tersebut sukar terpilih melalui perwakilan politik ini.

B. Komunikasi Poltik

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan mengacu pada teori komunikasi. Sesuai dengan tradisi baru dalam ilmu politik prespektif dan kerangka acuan dari berbagai disiplin ilmu. Menurut Karl. W. Deutsch, yang dikemukakan oleh Andrinov A. Chaniago, telah mengembangkan suatu pendekatan baru dalam analisa politik dengan berdasar pada teori komunikasi dan sibernetika. Teori komunikasi tersebut, memandang tugas pemerintah dan politik dalam artian suatu proses pengadilan dan pengkoordinasian usaha-usaha manusia demi tercapainya suatu tujuan. Didalam kerangka umum ini, keputusan diambil agar menjadi mekanisme dasar bagi proses untuk mewujudkan suatu tujuan.

[3] Qory K. Putri, M. Y. Tiyas Tinov, *"Efektifitas Reses Anggota DPRD Kab. Bengkalis Periode 2009-2014 (Studi Dapil I Kecamatan Bantan, Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Rupat,dan Kecamatan Rupat Utara)"* Jurnal Online Mahasiswa Vol 1, No. 1 (Februari 2014), (Artikel Online) , 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teori atau pendekatan komunikasi tersebut lebih berpacu pada proses pembuatan keputusan dibandingkan dengan konsekuensi dari keputusan itu. Ini mungkin sesuai dengan model sibernetika, yang memiliki maksud lebih pada pengadilan dan pengkoordinasian terhadap suatu tujuan. Titik berat dari sibernetika adalah hanya pada proses pengendalian, yang merupakan suatu bantuan pada tindakan yang akan dilakukan, yang berarti bahwa pendekatan tersebut sangat memperhatikan problem dinamika yang ada. Arus informasi lah yang menghubungkan pengendalian dengan tindakan, yang merupakan menjadi unit analisa yang utama.

Konsep-konsep pokok teori komunikasi memandang pemerintah sebagai suatu sistem pembuatan keputusan yang didasarkan pada berbagai arus informasi. Hal ini dapat difahami dengan baik apabila bisa berusaha membiasakan pada diri kita pada konsep-konsep terpenting teori tersebut. Pada dasarnya ada dua macam konsep: (1) konsep yang ada kaitannya dengan bangun (struktur) kerja, dan (2) konsep yang memusatkan perhatian pada berbagai arus dan proses. Mengenai yang pertama, Deutsch telah berusaha mengembangkan suatu model tentang cara yang dipakai struktur kerja dalam melaksanakan fungsinya. Peratama harus ada penerima, atau sistem penerimaan, sebagaimana nama yang diberikannya. Sistem yang mau menerima itu tadi menerima informasi dari lingkungan, baik dalam negeri maupun luar negeri.[4]

[4] Andrinof A. Chaniago, *Teori Politik Modern,* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 369.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ilmuan lain Dan Nimmo, yang dikemukakan oleh Novel Ali mengartikan politik sebagai kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Dalam berbagai hal orang berbeda satu sama lain jasmani, bakat, emosi, kebutuhan, cita -cita, inisiatif, perilaku, dan sebagainya. Lebih lanjut Nimmo menjelaskan, kadang -kadang perbedaan ini merangsang argumen, perselisihan, dan percekcokan. Jika mereka menganggap perselisihan itu serius, perhatian mereka dengan memperkenalkan masalah yang bertentangan itu, dan selesaikan inilah kegiatan politik.[5] Sehingga kegiatan politik ini sangat di hubungkan dengan komunikasi.

Dan menurut Maswadi Rauf, yang dikemukakan oleh Rochajat Harun dan Sumarno AP. Pengertian Komunikasi Politik itu adalah sebagai objek kajian ilmu politik, karena pesan-pesan yang diungkapkan dalam proses komunikasi bercirikan politik yaitu berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan dan juga aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik. Maswadi Rauf melihat komunikasi politik dari dua dimensi, yaitu komunikasi politik sebagai kegiatan pollitik dan sebagai kegiatan ilmiah.[6]

Komunikasi sebagai kegiatan politik merupakan penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain. Kegiatan tersebut bersifat empirik karena dilakukan secara nyata dalam

---

[5] Ali, novel. *Peradaban komunikasi politik*, (Bandung: remaja rosdakarya 1999), 120.
[6] Rochhajat Harun dan Sumarno AP. *Komunikasi Politik sebagai Suatu Pengantar*. (Bandung: CV Mandar Maju , 2006), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan sosial, sedangkan komunikasi politik sebagai kegiatan ilmiah maka komunikasi politik adalah salah satu kegiatan politik dalam sistem politik.

Menurut Rusadi Kantaprawira seorang pakar hukum, yang dikemukakan oleh Andrial. Pengertian Komunikasi Politik adalah penghubungan pikiran politik yang hidup di dalam masyarakat, baik itu pikiran intern golongan, asosiasi, instansi ataupun sektor kehidupan politik pemerintan. Rusadi melihat komunikasi politik dari sisi kegunaannya.[7]

Menurut Hegel dan Marx, yang dikemukakan oleh Henry Subiakto, Rachmah Ida. Perkembangan tahapan sejarah merupakan hasil proses konflik yang meningkat melampaui waktu. Sedangkan menurut George Herbert Mead yang juga dikemukakan oleh Henry Subiakto, Rachmah Ida, mengungkapkan bahwa kehidupan sosial dapat dipahami sebagai suatu proses, dan setiap kejadian selalu mengandung waktu. Maka bisa dikatakan bahwa pendekatan proses merupakan sumber yang potensial untuk membangun teori komunikasi politik. Dan Menurut Mead, negosiasi merupakan unsur mutlak dari kehidupan sosial, dan manusia harus bekerja bersama disegala bidang kehidupan.[8]

Berdasarkan pengertian dari beberapa para ahli di atas, peneliti memandang komunikasi politik sebagai upaya dari pelaku komunikasi (anggota DPRD dan konstituennya) untuk memperoleh aspirasi-aspirasi

[7] Ardial, *Komunikasi Politik*, (Jakarta Barat: PT Indeks 2010), 23.
[8] Henry Subiakto, Rachmah Ida, *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi,* Edisi Kedua. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berkembang di antara anggota DPRD dan konstituennya, yang kemudian diteruskan menjadi sebuah kebijakan. Dengan adanya kesesuaian antara kepentingan masyarakat dan pemerintahan daerah akan mendorong terciptanya kesejahteraan di setiap daerahnya. Anggota dewan dalam masa reses melakukan komunikasi politik baik secara vertikal maupun secara horizontal karena komunikasi politik merupakan salah satu fungsi sistem politik. Wakil rakyat atau anggota parlemen dapat dikatakan sebagai komunikator, yang menjadi perantara antara konstituennya dengan pemerintah. Ia harus menjaring masalah, gagasan dan mendengarkan pesan-pesan mereka dengan menggunakan segala kemampuan komunikasinya. Lembaga legislatif atau parlemen sebagai lembaga politik formal dalam supra struktur politik memiliki fungsi komunikasi politik.

Dikemukakan oleh Dan Nimmo, Mark Roelofs mengatakan bahwa komunikasi tidak jauh dengan kegiatan politik yang mana pembicaraan atau lebih tepatnya kegiatan berpolitik adalah berbicara. Ia lebih menekankan bahwa politik tidak hanya pembicaraan, dan tidak semua pembicaraan itu politik. Tetapi hakikat pengalaman politik adalah kondisi dasar bahwa politik adalah kegiatan berkomunikasi antara orang-orang. Komunikasi meliputi politik, bila orang mengamati konflik pasti akan ada perselisihan melalui komunikasi. Bila orang menyelesaikan perselisihan mereka,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelesaian itu adalah hal-hal yang diamati, diinterpretasikan dan dipertukarkan (transaksi) melalui komunikasi.[9]

Dari yang disebut transaksi politik itu muncul makna perselisihan sosial dan penyesuaiannya, dan dalam konflik itu tercipta konflik-konflik baru. Dan tersusun makna-makna yang terus berubah yang diberikan oleh warga Negara kepada gagasan abstrak seperti demokrasi, kemerdekaan dan keadilan, kepada lembaga-lembaga utama seperti kepresidenan, kongres dan pengadilan, kepada tokoh-tokoh politik yang dikemukakan oleh Andrinov A. Chaniago seperti Jimmy Carter, Gerald Ford, atau Richard Nixon, kepada bangsa, benderanya, lagu kebagsaanya, monument-monumen pahlawan. Jadi disini dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik adalah suatu kegiatan (komunikasi) yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia didalam kondisi-kondisi konflik. [10]

Komunikasi politik juga memiliki fungsi-fungsi tertentu dalam setiap sistem sosial. Menurut A.W. Widjaja fungsi komunikasi politik dalam setiap sistem sosial meliputi beberapa hal berikut :

a. Informasi : pengumpulan, penyimpanan, pemprosesan, penyebaran berita, data, gambar, fakta dan pesan opini dan komentar yang dibutuhkan agar dapat dimengerti dan bereaksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan

[9] Nimmo Dan, *Komunikasi Politik, komunikator, pesan, media,*(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,, 2005), 7-8.
[10] Andrinov A. Chaniago, *teori politik modern,* 367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan orang lain agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Sosialisasi (pemasyarakatan):

a. penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif sehingga ia sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif di dalam masyarakat.
b. Motivasi : menjelaskan tujuan setiap masyarakat jangka pendek maupun jangka panjang, mendorong orang menentukan pilihannya dan keinginannya, mendorong kegiatan individu dan kelompok berdasarkan tujuan bersama yang akan dikejar.
c. Perdebatan dan diskusi : menyediakan dan saling menukar fakta yang diperlukan untuk memungkinkan persetujuan atau menyelesaikan
d. perbedaan pendapat mengenai masalah publik menyediakan dan saling menukar fakta yang diperlukan untuk memungkinkan persetujuan atau menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai masalah publik.[11]

Dalam melakukan komunikasi politik terhadap konstituen di daerah pemilihannya, anggota DPRD menjalankannya dalam bentuk komunikasi politik menurut Dan Nimmo seperti berikut :[12]

[11] A.W. Widjaja, *Komunikasi: Komunikasi dan Hubungan Masyarakat,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 9- 10.
[12] Nimmo Dan, *Komunikasi Politik (komunikator, pesan, dan media)*, 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bentuk komunikasi interpersonal

Merupakan bentukan dari hubungan satu kepada satu. Kegiatannya meliputi dialog/tatap muka antara anggota DPRD dengan konstituennya. Dialog/tatap muka merupakan bentuk komunikasi yang efektif karena bisa berlangsung timbal balik dan setiap pelaku komunikasi tersebut bisa leluasa menyampaikan ide-ide, dan keinginan-keinginan mereka tanpa dibatasi oleh jarak.

b. Bentuk komunikasi organisasi

Menggabungkan penyampaian satu kepada satu dan satu kepada banyak. Kegiatannya meliputi sidang, konvensi, ceramah dan penyuluhan yang dilakukan oleh anggota DPRD dengan tema yang disesuaikan dengan permasalahan yang tengah berkembang di tengah masyarakat.

Fungsi komunikasi politik mempunyai makna dan arti yang sangat penting dalam setiap proses politik dalam sebuah sistem politik baik itu oleh infra maupun supra struktur politik. Sudijono Sastroadmodjo menyatakan:

> "Fungsi komunikasi politik itu adalah fungsi struktur politik menyerap berbagai aspirasi, pandangan-pandangan dan gagasan-gagasan yang berkembang dalam masyarakat dan menyalurkan sebagai bahan dalam penentuan kebijaksanaan. Selain itu, fungsi komunikasi politik juga merupakan fungsi penyebarluasan rencana-rencana atau kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah kepada rakyat. Dengan demikian fungsi ini membawakan arus informasi timbal balik dari rakyat kepada pemerintah dan dari pemerintah kepada rakyat."[13]

Di samping dapat memberikan pengaruh dalam proses pembuatan kebijaksanaan, komunikasi politik juga berfungsi sebagai jalan

[13] Sastroadmodjo, Sudijono, *Perilaku Politik*, (Semarang; IKIP Semarang Press, 1995) 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalirnya informasi politik, sehingga secara lebih spesifik dapat mengetahui apa-apa yang menjadi aspirasi rakyat yang akan dirumuskan dalam suatu kebijaksanaan yang dapat dirasakan oleh rakyat sebagai aspirasi mereka. Melalui kegiatan komunikasi politik yang dilandasi oleh kepentingan seluruh rakyat serta memberikan kelangsungan hidup dari lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) sekaligus berfungsinya lembaga tersebut yang bekerja dalam suatu sistem politik melalui informasi-informasi dari hasil komunikasi-komunikasi politik yang merupakan input bagi DPRD.

Terhadap arti pentingnya komunikasi politik antara kedua belah pihak tersebut lebih jauh dirasakan, terutama dalam hal keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita perjuangan seluruh rakyat yang dirumuskan dalam suatu kebijaksanaan pemerintahan, dimana sebagian besar diantara rakyat pengaruhnya adalah yang tidak langsung, yaitu melalui perwakilan. Oleh karena itu tuntutan dan harapan terhadap berperannya lembaga perwakilan rakyat sangat diperlukan oleh seluruh rakyat.

Dalam arti yang paling sederhana, komunikasi politik merupakan kontak antara wakil dan konstituennya. Kontak politik ini merupakan hubungan di antara berbagai pikiran yang hidup dalam masyarakat. Kontak politik antara wakil dan konstituennya ini biasanya memperlihatkan bentuk-bentuk tertentu pula.[14] Untuk menjelaskan

[14] Rozidetano P. Hanida, *Bentuk Komunikasi Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana bentuk-bentuk komunikasi politik, A.W Widjaja membaginya ke dalam tiga kelompok yaitu :

a. Komunikasi personal

Komunikasi yang ditujukan kepada sasaran yang tunggal, bentuknya dapat berupa : anjang sono, tukar pikiran dan sebagainya. Komunikasi personal efektifitasnya paling tinggi karena komunikasinya timbal balik dan terkosentrasi.

b. Komunikasi kelompok

Komunikasi yang ditujukan kepada kelompok yang tertentu. Kelompok adalah suatu kumpulan manusia yang mempunyai antar hubungan sosial yang nyata dan memperlihatkan struktur yang nyata pula. Bentuk komunikasi ini adalah : ceramah, briefing, indoktrinasi, penyuluhan dan sebagainya.

c. Komunikasi massa

Komunikasi yang ditujukan kepada massa atau komunikasi yang menggunakan media massa. Massa disini adalah kumpulan orang-orang yang hubungan antar sosial tidak jelas dan tidak mempunyai struktur tertentu.[15]

C. Reses

Salah satu bentuk komunikasi politik adalah melakukan kegiatan reses yang di laksanakan oleh anggota dewan, Didalam undang-undang

---

Daerah Terhadap Konstituen di Daerah Pemilihannya, (Skripsi, Tidak Diterbitkan, FISIP, Universitas Andalas). Tersedia di (repository.unand.ac.id), 7-8.

[15] A.W. Widjaja, *Komunikasi: Komunikasi dan Hubungan Masyarakat,* 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, reses para dewan dilakukan untuk menampung aspirasi masyarakat terkait pembangunan di daerah yang diwakilinya. Kegiatan reses juga dijelaskan pada pasal 81 tetang kewajiban anggota DPRD huruf E dan F "kunjungan kerja secara berkala adalah kewajiban anggota DPR untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPR. Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan kepada pemilih di daerah pemilihannya pada setiap masa reses dan masa sidang melalui perjuangan politik yang menyangkut aspirasi pemilihnya.[16]

Menurut Zuhri, yang dikemukakan oleh Qory Kumala Putri dan M.Y. Tiyas Tinov. Reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses.[17] Sedangkan masa reses adalah masa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diluar kegiatan masa sidang dan diluar gedung. Masa reses mengikuti masa persidangan yaitu dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun atau 14 kali reses dalam

[16] Undang-undang republik Indonesia Nomor 22 tahun 2003 Tentang Susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, Dewan perwakilan rakyat, Dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat Daerah, Pdf.

[17] Qory K. Putri, M. Y. Tiyas Tinov, *"Efektifitas Reses Anggota DPRD Kab. Bengkalis Periode 2009- 2014 (Studi Dapil I Kecamatan Bantan, Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Rupat,dan Kecamatan Rupat Utara)"* Jurnal Online Mahasiswa Vol 1, No. 1 (Februari 2014), (Artikel Online), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

periode 5 tahun masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pelaksanaan reses yang merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota DPRD perlu dilakukan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala dengan cara bertemu konstituen pada daerah pemilihannya masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan *check and balances* antara DPRD dan pemerintah daerah.

Menurut tata tertib dan kode etik DPRD kabupaten Jombang masa jabatan 2014-2019 BAB VIII tentang persidangan, reses, dan rapat Bagian kesatu pasal 64 dan 65, tujuan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah menyerap dan menindak lanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada kontituen didaerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan, ada 4 tahap dalam melaksanakan kegiatan reses yaitu:[18]

a. Rapat Pimpinan dan atau Badan Musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan reses.
b. Penjelasan pelaksanaan reses oleh Pimpinan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
c. Pelaksanaan Reses.
d. Rapat Paripurna pelaporan hasil reses.

[18] Tata Tertib Dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang Masa Jabatan 2014-2019, Sekertariat DPRD Kabupaten Jombang, 31-32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI DATA

A. Gambaran Umum Kabupaten Jombang

1. Kondisi Geografis Daerah

Dalam sejarahnya Jombang termasuk kabupaten yang masih muda usianya, setelah memisahkan diri dari gabungannya dengan Mojokerto yang berada di bawah pemerintahan bupati Raden adipati ario Kromodjojo, yang di tandai dengan tampilannya pejabat yang pertama mulai tahun 1910 sampai dengan tahun 1930 yaitu Raden Adipati Ario Soerjo Adiningrat. Menurut sejarah lama, dalam cerita rakyat mengatakan bahwa salah satu desa yaitu desa tunggorono, merupakan gapura keraton Majapahit bagian barat, sedang letak gapura sebelah selatan adalah desa ngrimbi, dimana sampai sekarang masih terdapat bangunan candi peninggalan majapahit. Cerita ini dikuatkan dengan dengan banyaknya nama-nama desa dengan awalan "Mojo" (Mojoagung, Mojotrisno, Mojolegi, Mojowangi, Mojowarno, Mojojejer, Mojodanu, dan masih banyak lagi).

Salah satu peniggalan sejarah di kabupaten jombang candi ngrimbi, pulosari bareng bahkan di dalam lambang daerah jombang sendiri dilukiskan sebuah gerbang, yang dimaksudkan sebagai gerbang Mojopahit dimana jombang sebagai wewenangnya suatu catatan yang pernah diungkapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam majalah intisari bulan Mei 1975 halaman 72, dituliskan laporan Bupati Mojokerto Raden Adipati Ario Kromodjojo kepada residen Jombang tanggal 25 Januari 1898 tentang keadaan Trowulan salah stau *onderdistrict afdeeling* Jombang pada tahun 1880. Sehingga kegiatan pemerintahan di jombang sebenarnya bukan sejak berdirinya (tersendiri) Kabupaten Jombang kira-kira 1910, melainkan sebelum tahun 1880 dimana Trowulan pada saat itu sudah menjadi *onderdistrict afdeeling* Jombang, walaupun saat itu masih terjalin menjadi satu Kabupaten dengan Mojokerto dari berdirinya gereja krierto.

Fakta yang lebih menguatkan bahwa sistem pemerintahan Kabupaten Jombang telah terkelola dengan baik adalah saat itu telah ditempatkan seorang asisten resident dari pemerintahan Belanda yang kemungkinan wilayah Mojokerto dan Jombang lebih-lebih bila ditinjau dari berdirinya Gereja Kristen Mojowarno Sekitar Tahun 1893 yang bersamaan dengan berdirinya Maasjid Agung di Kota Jombang, juga tempat peribadatan Tridharma bagi pemeluk Agama Kong hu Chu di Kecamatan Gudo sekitar Tahun 1700.

Disebutkan dalam cerita rakyat tentang hubungan Bupati Jombang dengan Bupati Sedayu dalam soal ilmu berkaitan dengan pembuatan Masjid Agung di kota Jombang dan berbagai lain, semuanya merupakan Petunjuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mendasari eksistensi awal-awal suatu tata pemerintahan di Kabupaten Jombang.[1]

Kabupaten Jombang memiliki luas wilayah keseluruhan 1.159,50 Km^2 atau hanya 95% dari keseluruhan wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang memiliki 21 kecamatan 30 desa serta 1.258 dusun. Dari jumlah tersebut termasuk juga empat kecamatan-kecamatan di dapil III yang masing-masing memiliki jumlah desa dan luas wilayah sendiri, anatara lain:[2]

Tabel 3.1 Jumlah Desa Berdasarkan Kecamatan di Dapil III

Nama Kecamatan	**Jumlah Desa**
Mojoagung	18 Desa
Mojowarno	19 Desa
Wonosalam	9 Desa
Bareng	13 Desa

Secara geografis Kabupaten Jombang berada pada koridor bagian tengah wilayah Propinsi Jawa Timur, berada pada posisi silang yaitu pada jalur Surabaya-Madiun dan Malang- Babat, dan secara geografis terletak di sebelah selatan garis katulistiwa berada diantara 112º 03’45” dan 112º

[1] Profil Dprd Kabupaten Jombang.
[2]Statistik Daerah Kabupaten Jombang tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

27’21” Bujur Timur dan antara 07º 20’37” dan 07º 45’45” Lintang Selatan. Kabupaten Jombang memiliki luas wilayah 115.950 Ha. Sebagian besar kondisi topografi wilayah Kabupaten Jombang (67,09%) cukup datar yaitu berada pada kemiringan 0-2º. Sedang sisanya adalah daerah berbukit-bukit, seperti Kecamatan Kabuh, Plandaan dan Kudu dengan rata-rata kemiringan 25º. Namun ada juga yang letaknya di pegunungan, yaitu Kecamatan Wonosalam dengan rata-rata kemiringan > 45º. Kabupaten Jombang terletak pada ketinggian ± 44 m di atas permukaan air laut.

Kabupaten Jombang mempunyai potensi sebagai wilayah agraris, dengan topografi sebagai berikut, Daerah pegunungan, dengan rata-rata kemiringan 40% di wilayah Kecamatan Wonosalam (komplek Gunung Anjasmoro), Daerah berbukit, dengan rata-rata kemiringan 2-15% di wilayah Kecamatan Kabuh, Ngusikan dan Plandaan (daerah utara Sungai Berantas). Daerah ini merupakan pegunungan kapur (Pegunungan Kendeng) dan banyak ditumbuhi Pohon Jati, akan tetapi di bagian utara daerah ini cukup baik untuk pertanian, Daerah landai sampai bergelombang, dengan rata-rata kemiringan 0-2%, meliputi sebagian besar wilayah Kecamatan Jombang. Dan Batas-batas wilayah adinistrasi Kabupaten Jombang, meliputi:

a. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto
b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk

d. Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Kabupaten Lamongan

Kabupaten Jombang dapat dilihat pada peta berikut :

Gambar 3.1 Peta Kabupaten Jombang[3]

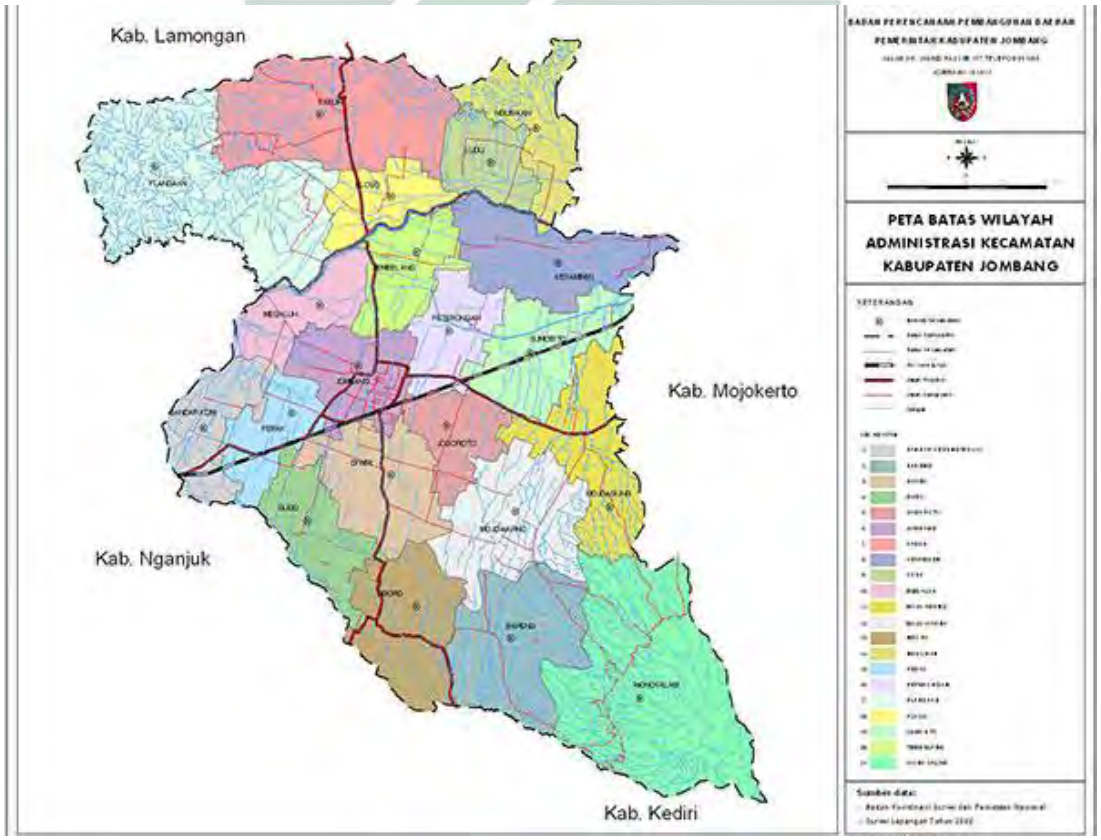

Seperti yang telah di sebutkan di atas wilayah Kabupaten Jombang terdiri dari 21 Kecamatan, di antara nya adalah kecamatan Dapil III yaitu Kecamatan Mojoagung,

[3] Statisik Daerah Kabupaten Jombang tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mojowarno, Wonosalam, dan Bareng, masing-masing wilayah kecamatan tersebut memiliki luas wilayah sebagai berkut:

Tabel 3.1 Nama Kecamatan dan Luas Wilayahnya[4]

Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)
Mojoagung	6297
Mojowarno	6277
Wonosalam	13016
Bareng	6551

Dari 22 Kecamatan, Kecamatan Wonosalam yanag memiliki luas wilayah yang paling banyak dari kondisi geografis.

2. Pemerintahan

Untuk memepermudah menjalankan pemerintahan Kabupaten Jombang dibagi menjadi beberapa Kecamatan dan desa seperti yang telah disebutkan di atas yaitu 306 desa dan 22 Kecamatan. Pemerintahan ditinjau dari sisi legislatif yakni keanggotaan dalam DPRD, terdiri dari delapan fraksi. Dari delapan fraksi tersebut Partai PKS dan PDI-P berhasil menempatkan wakil terbanyak di kursi legislatif Kabupaten Jombang. Dari masing-masing Fraksi memiliki delapan orang perwakilan, sedangkan keseluruhan anggota

[4] Statisik Daerah Kabupaten Jombang tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DPRD Kabupaten Jombang sebanyak 50 orang. Berikut adalah tabel jumlah anggota DPRD Kabupaten Jombang.

Tabel 3.1 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Jombang Menurut Partai Politik Dan Jenis Kelamin.[5]

Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
PDI-P	8	1	9
PKB	5	3	8
Golkar	4	3	7
Demokrat	3	3	6
PKS	5	-	5
PPP	3	-	4
Nasdem	4	-	4
PAN	3	1	3
Hanura	2	-	2
Gerindra	2	-	2

Pemerintah Kabupaten Jombang pada tahun 2015 memiliki dana sebesar Rp. 2,15 Triliun. Dari dana tersebut sebesar 17% atau senialai 364 Milyar rupiah disumbangkan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan sumbangan terbesar diperoleh dari Dana Perimbangan tepatnya Dana Alokasi Umum (DAU) tepatnya yaitu Rp. 1,032 Triliyun.

[5] Statisik Daerah Kabupaten Jombang tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sarana Pendukung

Pada tahun 2015, sebagian besar masyarakat Jombang tepatnya 45,23% menggunakan fasilitas sumber air minum sumur bor/pompa, hanya sebagian kecil saja masyarakat yang dapat terfasilitasi oleh sumber air minum dai PDAM yakni sebesar 0,77%. Berdasarkan hasil Susenas 2015, diketahui bahwa PLN telah menjangkau hampir seluruh penduduk di Kabupaten Jombang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya persentase rumah tangga yang telah menggunakan sumber penerangan PLN, baik melalui meteran maupun non meteran.

Jumlah pelanggan PLN pada tahun 2015 berjumlah 139.787 pelanggan. Terjadi kenaikan 3,64% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6%. Listrik didistribusikan oleh PLN ke pelanggan mencapai 876.260.350 KWh. Dan pendistribusian tersebut mengalami peningkatan sebanyak 849.120.510 KWh. Peningkatan distribusi listrik PLN sejalan dengan kenaikan jumlah pelanggan pada tahun 2015.

PDAM kabupaten Jombang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan jumlah pelanggan yang positif, yang mencapa sebesar 18.721 pelanggan, angka tersebut naik sebesar 7,18% dari jumlah pelanggan sebelumya sebesar 17.467. pada tahun 2015 pelanggan disominasi oleh pelanggan rumah tangga sebesar 17.980 atau sebesar 96% dari total pelanggan PDAM.

Sarana lain yang mendukung masyarakat yaitu transportasi dan komunikasi. Kereta api menjadi salah satu modal transportasi umum yang cukup popular di kalangan masyarakat Jombang. Pada tahun 2015 terdaat 591.300

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penumpang kereta api yang berangkat dari stasiun di wilayah kabupaten Jombang. Keberangkatan paling banyak ada pada stasiun besar Kabupaten Jombang, dan paling sedkit di stasiun Curah malang dengan jumlah penumpang 34.562 orang. Sarana umum yang lain yaitu busying peminatnya sekitar 267.661 penumpang dan tercatat 108.807 bus datang membawa penumpang 458.525 penumpang.

B. Demografi Kabupaten Jombang

1. Proporsi Penduduk Menurut Jumlah Dan Jenis Kelamin Berdasakan Kecamatan

Berdasarkan bentuk piramida penduduk di atas, mengarah pada bentuk piramida stasioner, dimana perbanadingan jumlah penduduk dewasa masih lebih besar dari penduduk muda. Jika di lihat dari piramida tersebut, penduduk yang berusia di atas 65 tahun yang berjenis kelamin laki-laki lebih sedikit dari peneduduk perempuan. Hal ini sama dengan fenomena yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari dimana penduduk lansia perempuan lebih banyak dari lansia laki-laki. Berikut adalah piramida penduduk Kabupaten Jombang:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.1 piramida penduduk Kabupaten Jombang[6]

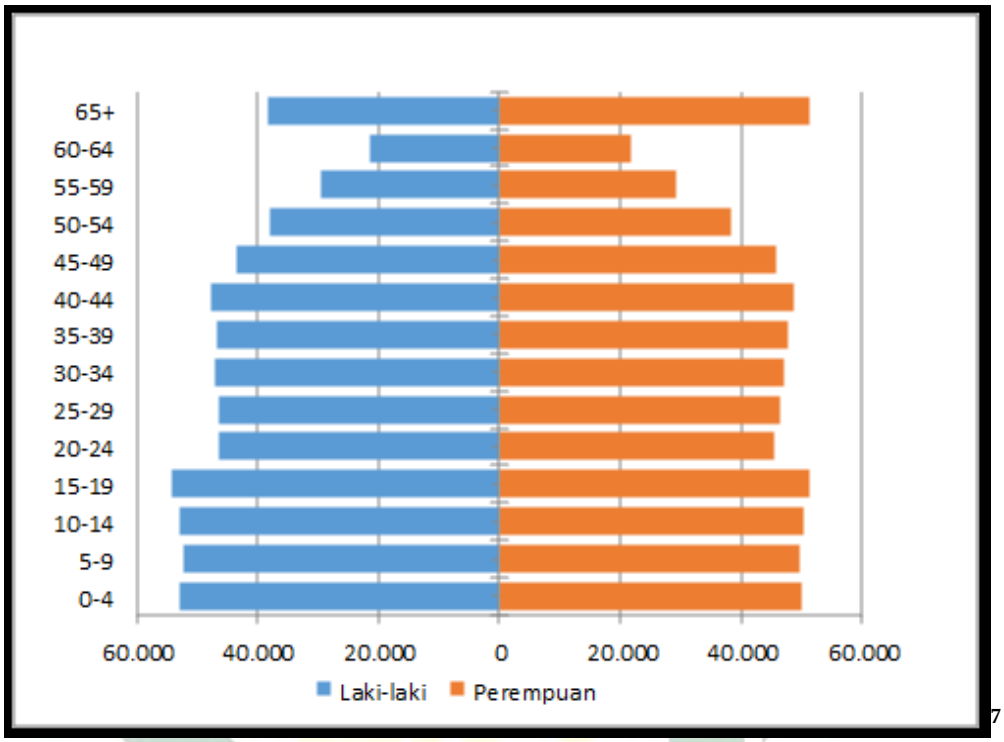

Penduduk Kabupaten Jombang sejumlah 1.240.958 jiwa pada tahun 2015, yang tercatat bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Bedasarkan perhitungan rasio jenis kelamin (*sex ratio*), dalam 100 orang penduduk perempuan, terdapat 99 orang penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa belum terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Berikut adalah jumlah penduduk Kabupaten Jombang.

[6] Statisik Daerah Kabupaten Jombang tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.2 Jumlah penduduk kabupaten Jombang pada tahun 2015[8]

Jenis Kelamin	**Jumlah Penduduk**
Laki-laki	617.194 jiwa
Perempuan	623.791 jiwa
Total	1.240.958 jiwa
Sex ratio	98,94
Pertumbuhan penduduk(%)	0,52%

Dari jumlah penduduk tersebut tercatat 100 orang penduduk produktif memiliki beban ± 47 orang penduduk yang tidak produktif. Angka dependency ratio tersebut berkurang. Dengan membandingkan jumlah penduduk yang ada dengan jumlah luasan wilayah, diketahui bahwa penduduk yang terbesar di wilayah Kabupaten Jombang memiliki kepadatan sebesar 1.070 jiwa setiap satu km^2. Para peserta KB di Kabupaten Jombang lebih memilih menggunakan non metode kontrasepsi jangka panjang (MKEJ). Tercatat sejumlah 165.011 peserta menggunakan non MKEJ dengan metode suntik yang paling banyak diminati. Biaya KB dengan suntik memang relatif terjangkau oleh masyarakat. Selain itu, suntik KB memiliki waktu efektif satu bulan sampai tiga bulan. Kelebihan-kelebihan ini yang bisa jadi membuat masyarakat pada umumnya lebih memilih mengguanakan suntik KB.

[8] Statisik Daerah Kabupaten Jombang tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelesan diatas juga termasuk daerah pilihan (dapil) tiga yang menjadi studi kasus penelitian termasuk mojoagung memiliki jumlah mojowarno, wonosalam dan bareng, masing2 memiliki jumlah penduduk dan sex ratio yang berbeda, berikut adalah tabel jumlah penduduk dan sex ratio setiap kecamatan.

Tabel 3.2 Jumlah penduduk Kecamatan dapil III Kabupaten Jombang[9]

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	*Sex ratio*
1	Mojoagung	38.126	38.008	76.134	100,31
2	Mojowarno	44.378	43.964	88.342	100,94
3	Wonosalam	15.993	15.639	31.632	102,26
4	Bareng	24.980	25.552	50.532	97,76

Jumlah penduduk kecamatan Mojoagung berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2015 memiliki jumlah 76.134 jiwa, dengan jumlah laki-laki 38.126 dan perempuan 38.008, sex ratio menunjukkan angka 100, 31 yang berarti laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Mojoagung 0,73%, Kecamatan Mojoagung yang memiliki jumlah penduduk 76.134 jiwa dengan jumlah berjenis kelamin laki-laki 38.126 jiwa, dan yang berjenis kelamin perempuan memiliki jumlah 43.964 jiwa, dengan sex ratio 100,94 jiwa yang berarti laju pertumbuhan penduduk 0,52%. Kecamatan Wonosalam memiliki

[9] Statisik Daerah Kabupaten Jombang tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumlah Penduduk 31.632 jiwa, yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 15.993 jiwa dan jumlah perempuan 15.639, dengan sex ratio 102,26 yang menunjukkan laju pertumbuhan penduduk berarti 0,55%. Dan Kecamatan Bareng memiliki Jumlah penduduk 50.532 jiwa, yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 24.980 jiwa, penduduk perempuan berjumlah 25.552 jiwa, yang memiliki sex ratio 97.76 yang berarti menunjukkan laju pertumbuhan penduduknya 0,32%.

Selain dari perkembangan jumlah penduduk, kesehatan juga merupakan salah satu fokus utama pembangunan manusia. Ketersediaan fasilitas kesehatan serta kemudahan dalam menjangkaunya sangat menentukan seberapa efektifnya peranan fasilitas kesehatan tersebut. Seluruh kecamatan di kabupaten jombang memiliki puskesmas sebagai sarana kesehatan yang dapat di jangkau lebih dekat. Untuk menjagkau seluruh penduduk yang ada, banyak pukesmas yang memiliki puskesmas pembantu. Beberapa kecamatan tercatat memiliki lebih dari satu puskesmas pembantu.

Dalam hal pembangunan manusia indikator atau ukuran kinerja pemerintah daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM sekarang di hitung dengan menggunakan metode yang baru. Perhitungan ini di bangun melalui tiga dimensi, yaitu kesehatan, pengetahuan dan standar hidup layak. Data seri angka IPM dapat di lihat di tabel berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.2 Komponen Penyusun Ipm Kabupaten Jombang 2012-2015[10]

Komponen	2012	2013	2014	2015
Angka harapan hidup (tahun)	71,28	71,34	71,37	71,67
Angka harapan lama sekolah (tahun)	11,92	12,43	12,65	12,68
Rata-rata lama sekolah (tahun)	7,37	7,40	7,52	7,59
Pengeluaran perkapita disesuaikan (ribu rupiah	9.493	9.678	9.709	9.963

Data series angka IPM di Kabupaten Jombang menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dimana IPM terus menerus mengalami peningkatan dalam kurun 2012-2015. Terjadi kenaikan sebesar 0,52 poin, yaitu 71,37 pada tahun 2014 menjadi 71,67 pada tahun 2015. Dari komponen angka harapan sekolah penduduk jombang pada tahun 2015 dperkirakan dapat bersekolah sampai lulus sekolah dasar. Hal ini sesuai dengan rata-rata lama sekolahnya yang mencapai angka kurang lebih selama 7 tahun 7 bulan.

[10] Statisik Daerah Kabupaten Jombang tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Komposisi penduduk menurut pedidikan di Kabupaten Jombang

Tabel 3.2 Jumlah PNS Pemda Kabupaten Jombang menurut Pendidikan Terakhir ditamatkan tahun 2014-2015

No	Pendidikan terakhir yang di tamatkan	Tahun 2014	Tahun 2015
1	SD	140	126
2	SMP	319	263
3	SMA	2.884	2.958
4	D1-D3	2.705	2.452
5	S1/D4	5.159	5.512
6	S2/S3	418	443
	Total	**11.625**	**11.754**

Dari tabel diatas dapat dilihat, sebagian besar PNS di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Jombang merupakan lulusan perguruan tinggi dengan gelar sarjana. Dan pada tahun 2015 tercatat sebanyak 5.512 orang PNS yang merupakan lulusan SI/D4. Dan secara keseluruhan jumlah PNS tahun 2015 lebih banyak dari tahun sebelumnya. Dengan demikian diharapkan kinerja pemerintahan dapat dapat ditingkatkan, hal ini mengindikasikan bahwa produktivitas kerja para PNS tersebut meningkat. Peningkatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produktivitas tersebut didukung dengan meningkatnya persentase PNS lulusan S1 ke atas dari 48% pada tahun 2014 menjadi 51% pada tahun 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Program anggota DPRD Kabupaten Jombang dalam memanfaatkan kegiatan reses di Dapil III

Bab ini menyajikan hasil dari penelitan yang bejudul komunikasi politik anggota DPRD kabupaten Jombang dapil III. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa proses. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari data dari informan melalui wawancara serta dokumentasi. Pada penelitian ini informan utama yaitu anggota DPRD Dapil III Kabupaten Jombang.

Data ini di peroleh dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan yang bersangkutan yaitu anggota DPRD dapil III kabupaten Jombang, sekertaris dewan Kabupaten Jombang, masyarakat yang mengikuti kegiatan reses. Pengumpulan data juga dilakukan dengan proses dokumentasi berupa foto-foto mengenai kegiatan reses Pengujian kredibilitas digunakan trianggulasi sumber dan trianggulasi teknik. Analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman yang meliputi data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (kesimpulan). Penelitian kualitatif ini menyajikan data secara naratif kemudian diambil suatu kesimpulan. Paparan data di tampilkan pada bagian ini dengan nama anggota DPRD dapil III kabupaten Jombang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.1 Nama-nama Anggota DPRD dapil III Kabupaten Jombang

Partai	Nama	Komisi
PDI-P	Donny Anggun, S. Sos	Komisi A
PDI-P	Totok Hadi Riswanto	Komisi B
PKB	M. Muhaimin, S. Ag, S. Pd.	Komisi A
Golkar	Hj. Mahmudah	Komisi B
Golkar	Arief Sutikno, SP.	Komisi A
Demokrat	Novita Eki Wadano, S. Sos.	Komisi B
PKS	Didik Darmadi, S.TP.	Komisi D
Nasdem	Ir. M Faishol.	Komisi D
PAN	H. Saichu, SE.	Komisi B
Hanura	H. Ikhnan, SE.	Komisi A

Sumber: Sekertariat DPRD Kabupaten Jombang

Setiap anggota DPRD memiliki program dari setiap fraksinya untuk mewujudkan aspirasi masyarakat demi kesejahteraan masyarakat Jombang. Seperti halnya yang sudah disebutkan didalam tupoksi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat tentang kewajiban anggota DPRD Kabupaten Jombang huruf I sampai K yang berbunyi:

> "Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya".[1]

Dengan kewajiban anggota DPRD yang berbunyi di atas, dapat disimpulkan bahwa semua anggota DPRD wajib melakukan kegiatan reses

[1] Tupoksi Anggota Dprd Kabupaten Jombang, Hal: 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menjadi agenda penting anggota DPRD Kabupaten Jombang salah satunya yaitu dapil III. Dengan adanya serap aspirasi masyarakat ini anggota DPRD dapat melakukan komunikasi dengan masyarakat di daerah pemilihannya, hal ini sebagai bentuk komunikasi politik anggota DPRD dapil III. Seperti yang telah disampaikan oleh bapak Pinto ketua Sekertaris Dewan, bahwa:

> "Reses itu wajib dilakukan setiap satu tahun tiga kali dengan anggaran dewan yang sudah ditentukan, reses di lakukan setiap awal tahun setelah 3 bulan penutupan dengan melaporkan hasil reses setiap dewan, reses di lakukan dalam jangka waktu 4 bulan, setiap anggota dewan mendapatkan anggaran yang di lakukan setiap individu"[2]

Dapat disimpulkan disini bahwa kegiatan komunikasi politik anggota dewan di lakukan setiap 1 tahun 3 kali dengan jangka waktu 4 bulan dengan anggaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah kabupaten, hal ini mengefektifkan anggota DPRD dalam hal finansial untuk melakukan kegiatan komunikasi dengan konstituennya, reses itu dilakukan dalam waktu 6 hari dengan titik-titik yang berbeda. Seperti yang disampaikan oleh Muhaimin. Disitu anggota dewan melakukan komunikasi politik secara kelompok seperti teori yang di sampaikan oleh A. W. Widjaja sebagaimana yang dikemukakan Rozidetano, bahwa komunikator dapat melaksanakan komunikasi dengan tiga cara, salah satunya adalah komunikasi kelompok yang berarti komunikasi yang ditujukan kepada kelompok tertentu, dan kelompok disini adalah kumpulan manusia yang memiliki hubungan sosial yang nyata dan juga memiliki struktur yang nyata, hubungan sosial yang memiliki interaksi sosial

[2]Pinto, *Wawancara,* Di Kantor Dprd Kabupaten Jombang, Jumat, 16 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disetiap pertemuannya[3] Bentuk komunikasi ini dilakukan dengan cara ceramah, briefing, indoktrinasi, penyuluhuan, dan yang lainnya. Komunikasi ini yang di lakukan oleh setiap anggota dewan dalam kegiatan reses.

Sebagaimana fungsi dari komunikasi politik itu sendiri adalah fungsi struktur politik yang menyerap berbagai aspirasi masyarakat, pandangan-pandangan dan gagasan-gagasan yang berkembang dalam masyarakat dan menyalurkan sebagai bahan dalam penentuan kebijaksanaan. Selain itu, fungsi komunikasi politik juga merupakan fungsi penyebarluasan rencana-rencana atau kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah kepada rakyat. Dengan demikian fungsi ini membawakan arus informasi timbal balik dari rakyat kepada pemerintah dan dari pemerintah kepada rakyat, hal ini di sampaikan oleh Sudijono Sastroadmodjo.[4]

Sesuai fungsi komunikasi politik yang disampaikan di atas sebagai penyerap aspirasi masyarakat dan juga menyampaikan informasi, reses adalah bentuk dari komunikasi anggota dewan terhadap konstituen dengan tujuan menyampaikan setiap program yang diinginkan oleh masyarakat hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Ikhnan dari fraksi HANURA dapil III.

> "Yang disampaikan dalam kegiatan reses tidak hanya serap aspirasi masyarakat tetapi juga memberikan informasi tentang program-program pemerintah kabupaten serta kesulitan-kesulitan yang terjadi seperti pembuatan E-KTP dari tahun-tahun lalu, anggota dewan memberikan penjelasan apa yang menjadi kendala nya dan apa penyebabnya".[5]

---

[3] Rozidetano P. Hanida, *Bentuk-Bentuk Komunikasi Politik*, Hal 11.
[4] Sastroadmodjo, Sudijono, *Perilaku Politik*, (Semarang; Ikip Semarang Press, 1995) 123.
[5] Ikhnan, *Wawancara,* Jombang, 05 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari program anggota DPRD untuk memanfaatkan reses sebagai alat komunikasi politik menjadi lebih terlihat. Karena sebagai anggota DPRD yang bukan hanya sebagai orang yang sangat berpengaruh dalam menjalankan program pemerintahan, melainkan juga bisa disebut sebagai tangan kanan masyarakat, yang mengayomi dan memenuhi tugasnya sebagai orang yang dipercayai oleh masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat.

Ada dua program yang dilaksanakan anggota DPRD Kabupaten Jombang sebagai bentuk komuikasi politik anggota DPRD dengan konstituennya. Program tersebut adalah reses dan jasmas, reses adalah serap aspirasi msyarakat yang di lakukan dengan mengadakan forum di setiap titik yang sudah di tentukan dengan jangka waktu enam hari. Berbeda dengan dengan jasmas walaupun sama-sama menyerap aspirasi masyarakat. Disampaikan oleh Bapak Muhaimin dari Fraksi PKB , dan Bapak Ikhnan dari fraksi HANURA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.1 Perbedaan Reses Dan Jasmas

NO	RESES	JASMAS (Jaringan Aspirasi Masyarakat)
1.	Reses dilakukan tiga kali dalam satu tahun dengan jangka waktu setiap tiga bulan, dan dilakukan selama enam hari enam titik yang sudah ditentukan oleh anggota DPRD Kabupaten Jombang.	Jasmas dilakukan setiap saat apabila ada mayarakat yang ingin melaporkan sesuatu.
2.	Reses dilakukan dalam forum dengan ketentuan jumlah peserta 80 peserta, dan didampingi oleh pemerintah desa.	Jasmas tidak di lakukan dalam forum tetapi dilakukan secara *face to face* dengan anggota DPRD di daerah pemilihannya masing-masing.
3.	Mayoritas peserta kegiatan reses adalah orang-orang yang sudah memilih anggota DPRD sebagai wakilnya	Jasmas dilakukan tanpa membuat laporan tetapi langsung proposal untuk diajukan kepada pemkab dan minta persetujuan agar dapat di realisasikan
4.	Kegiatan reses memiliki anggaran sendiri dari PEMKAB.	Tidak ada anggaran untuk serap aspirasi masyarakat
5.	Setiap kegiatan reses anggota DPRD wajib membuat laporan dan di PARIPURNAKAN.	Dan tidak di PARIPURNAKAN setiap melakukan jasmas.
6.	Setiap hasil reses akan mejadi pokok-pokok pikiran untuk di masukkan ke APBD.	

Sumber: Anggota DPRD Dapil III

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ada 2 program anggota DPRD dalam melakukan komunikasi politik. Tetapi dari 2 program tersebut yang lebih efisien menurut anggota DPRD dapil III adalah reses, karena reses dapat mengumpulkan massa sebanyak 80 orang sehingga bisa mengetahui apa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja keinginan dari sebagian masyarakat di daerah pemilihannya meskipun mayoritas adalah orang-orang yang sudah memilihnya.

Namun hal ini menjadi masalah bagi anggota DPRD yang melakukan reses. Pada tahun ini tidak diadakan kegiatan reses karena timbul konflik yang berhubungan dengan anggaran untuk reses. Menurut kode etik dalam kegiatan reses, anggota dewan tidak boleh mengeluarkan sedikit (pesangon) untuk peserta karena itu salah satu pelanggaran dalam kode etik anggota DPRD kabupaten Jombang anggaran anggota DPRD dalam Kegitan reses adalah Rp. 1.254.000 yang setiap anggotanya mendapatkan Rp. 25.080.000.

Dari anggaran reses yang sudah ditentukan, itu hanya dikeluarkan untuk makanan, minuman, dokumentasi dan penggandaan laporan, berikut adalah rincian pengeluaran anggaran kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Jombang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.1 Rincian Anggaran Kegiatan Reses Per Anggota Dprd Kabupaten Jombang

No	Jenis Pengeluaran	Jumlah
1.	Makanan a. Nasi kotak b. Snack dan minuman	Rp. 27.500 x 80 orang Rp. 15.000 x 80 0rang Rp. 12.500 x 80 orang
	Total	**Rp. 2.200.000**
2.	Uang Harian Dinas	Rp. 300.000 x 6 titik
	Total	**Rp. 1. 800. 000, 00**
3.	Dokumentasi	Rp. 90.000/ anggota
4.	Penggandaan Laporan	Rp. 90.000/ anggota
		Rp. 4. 180. 000 x 6 hari
S	**Total**	**Rp. 25. 080.000**

Sumber: Sekertaris Dewan Kabupaten Jombang.

Menurut anggota DPRD dapil III kegiatan reses juga menjadi keputusan yang sedikit sulit untuk anggota DPRD dalam konteks anggaran. Karena dalam konteks anggaran masih belum juga masih belum diatur didalam peraturan bupati. Seperti yang sudah disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Jombang dapil III Totok Hadi riswanto dari Fraksi PDI-P yang mengatakan bahwa:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Sekarang kalau kita mengundang seseorang, reses ini kan kita yang mengundang, lha kalau kita mengundang mau gak di kasih pesangon itu kita yang merasa tidak enak, atau katakanlah sungkan, tetapi kalau kita memberi pesangon itu sudah menyalahi aturan dalam kegiatan reses."

Dari anggota DPRD lain Saichu fraksi PAN juga mengatakan bahwa kesalahannya anggaran reses ini belum diatur di peraturan bupati secara jelas berapa-berapa nya, sehingga anggaran itu di pakai sesuai kebutuhannya.Hal ini menjadi salah satu alasan anggota DPRD tidak melakukan kegiatan reses, karena terlalu beresiko untuk masing-masing anggota DPRD. Namun dalam kegiatan reses ini tetap dimanfaatkan anggota DPRD dengan sebaik-baiknya untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pilihannya. Hampir semua anggota DPRD berpendapat kalau reses ini bisa jadi memberatkan karena anggaran yang tidak sesuai dengan pengeluaran. Namun hal ini juga tidak menjadi halangan anggota DPRD untuk melakukan serap aspirasi walaupun tidak melakukan reses. Karena serap aspirasi tidak berpaku pada tempat dan waktu melainkan dimana pun tempatnya bisa di lakukan.

B. Anggota DPRD Kabupaten Jombang menjadikan kegiatan reses sebagai media komunikasi politik.

Media komunikasi adalah hal yang paling umum di tengah-tengah masyarakat sosial, yang setiap masyarakat memiliki informasi dan membutuhkan informasi yang akan disampaikan satu sama lain. Sebagai makhluk sosial tidak dapat dipungkiri bahwa setiap individu saling membutuhkan. Komunikasi sebagai alat masyarakat untuk mengenal satu sama lainnya, sebagai proses masyarakat untuk mencapai tujuan masig-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing komunikasi ini tidak di lakukan hanya dalam lingkup dilingkungan saja, melainan juga dalam konteks pemerintahan. Komunikasi sebagai alat penyambung antara masyarakat dengan pemerintahan, begitu juga sebaliknya bahwa pemerintahan juga sebagai alat komunikasi pemerintahan dengan masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan, alat komunikasi politik yang paling berpengaruh terhadap masyarakat adalah anggota DPRD, yang basisnya sebagai perwakilan masyarakat di dalam pemerintahan. DPRD adalah penyambung masyarakat agar dapat sampai ke pemerintahan, segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat dari mulai, ekonomi, sosial, pendidikan, infrastruktur, dll. Sudah menjadi kewajiban anggota DPRD untuk mendengarkan dan membantu mewujudkan kebutuhan masyarakat demi kesejahteraan daripada rakyat sendiri.

Salah satu program DPRD yang diutamakan untuk masyarakat adalah kegiatan reses. Reses ini salah satu bentuk program anggota DPRD yang wajib dan harus dilakukan setiap 3 bulan sekali. Proses kegiatan ini dilakukan secara terstruktur, antara lain;

1. Rapat paripurna atau rapat pembukaan anggaran awal tahun yang dilakukan bersamaan dengan pembukaan kegiatan reses awal tahun yaitu bulan Januari.
2. Anggota dewan mengajukan laporan desa mana atau daerah mana yang akan dijadikan kegiatan reses dari fraksi atau pun personal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Anggota Dewan menentukan tempat dan waktu untuk setiap desa yang akan dikunjungi.
4. Setwan membuatkan surat untuk kepala desa-desa bahwa akan diadakan kegiatan reses di desa tersebut dengan waktu dan tempat yang sudah ditentukan anggota dewan dengan konstituen 80 orang.
5. Anggota dewan turun lapangan untuk melakukan kegiatan reses di daerah pemiilihannya masing-masing.
6. Dan yang terakhir setelah anggota dewan melakukan kegiatan reses di enam titik yang sudah ditentutukan secara personal ataupun melalui fraksi, masing-masing anggota dewan membuat laporan untuk disampaikan saat persidangan mulai di buka kembali untuk pelaporan kegiatan reses.

Ini adalah salah satu bentuk komunikasi anggota DPRD untuk dapat sampai kepada konstituennya. Disini anggota dewan sebagai orang-orang yang mengendalikan dan mengkoordinasi masyarakat untuk bisa sampai ketujuan masyarakat itu sendiri dan sebagai tujuan dari pemerintah kabupaten bahwa kesejahteraan masyarakat itu sangat penting. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Karl. W. Deutsch sebagaimana yang dikemukakan oleh Andrinov A. Chaniago bahwa keputusan diambil agar menjadi mekanisme dasar bagi proses untuk mewujudkan suatu tujuan.[6]

Namun setiap anggota DPRD berbeda-beda dalam melaksanakan kegiatan reses ini, ada yang lebih memilih dikalangan organisasi yang sudah mengusungnya, ada yang di kantor desa dengan masyarakat umum, ada juga

[6] Andrinof A. Chaniago, *Teori Politik Modern,,*(Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 369.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang di rumah anggota dewan itu sendiri, dan tentunya dengan waktu yang berbeda-beda. Kebanyakan dari anggota DPRD termasuk anggota dewan dapil III untuk melakukan kegiatan reses ini berada di desa. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Iknan partai Hanura.

"Kalau saya biasanya di kantor kepala desa dengan konstituen 80, tapi kadang-kadang sampai lebih dari 80 juga, untuk waktunya biasanya saya malam, karena kalau ambil waktu pagi atau siang malah justru nggak ada yang hadir, ya hadir tapi mungkin tidak sampai 80 konstituen, karena disini kan rata-rata petani, jadi bisanya malam".[7]

Yang disampaikan oleh Totok dari Fraksi PDI-P;

"Untuk serap aspirasi masyarakat saya lebih sering di rumah saya untuk desa saya sendiri atau kalau nggak gitu di balai desa mbak untuk di daerah yang lainnya,, karena dulu sebelum saya menjabat sebagai anggota dewan saya kepala desa di desa sini, jadi sedikit banyak saya tahu untuk desa saya, kalau untuk di desa saya sendiri saya lebih seringseringnya malam karena di desa saya sendiri tapi kalau di daerah lain saya milih jam kerj, kalau konstituennya tidak mencapai 80 biasanya saya gabungkan."[8]

Dan yang disampaikan oleh Muhaimin dari Fraksi PKB;

"Selama ini yang saya lakukan itu saya masuk ke dalam jami'iyah karna lebih efektif, jadi partisipasi masyarakat itu pas, kalau buat saya sudah masuk ke muslimat itu sudah jelas tinggi jadi kita hanya ada memberitahukan pemberitahuan awal kalau mau hadir kesana kepada pemipinan muslimatnya atau pimpinan organisasinya sudah itu. Dan memang rata-rata itu kalau kegiatan reses itu organisasi yang sudah ada itu kan enaknya diundangan itu sudah terstruktur lah kalau kita melakukan reses itu di…..mana? di lain organisasi kita mengundang sendiri mungkin bisa kita lakukan partisipasi masyrakat itu ketika pada waktu jam kerja jelas mungkin tingkat kehadiran masyarakat sagat rendah sekali bisa kita lakukan ketika malam, kalau malam kan tidak jam kerja jadi yang penting hasil akhirnya kalau saya tidak harus bertumpu pada waktu dan tempat dan organisasi mana yang tepenting kan mereka benar harus difasilitasi misalnya kita mengundang tempatnya itu

[7] Ikhnan, *Wawancara,* Mojoagung, 03 Mei 2017.
[8] Totok Hadi Riswanto, *Wwancara,* Bareng Jombang, 24 Maret 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibalai desa kita komunikasi dengan kepala desa dan yang hadir hanya itu-itu saja. Tingkat partisipasi masyarakat itu pada jam kerja juga sulit disamping itu mereka itu sering kali diundang, sering kali diajak ngomong RT, tokoh masyarakat itu kan sering diajak ngomong nah kita itu cari orang-orang yang selama ini memang merasa dan terjadi dampak dari kebijakan itu yang memang kita bantu. Mereka yang harus bersuara ya ini yang kita dahulukan kalau mereka-mereka ini kan sering yang namanya musyrenbangdes, musyrenbangkec seng gak tau melok ini yang mau kita ajak bicara."[9]

Yang disampaikan oleh anggota DPRD Saichu Fraksi PAN bahwa melakukan kegiatan reses ini dimana pun sesuai yang diminta oleh desa. Dari yang disampaikan oleh beberapa anggota dewan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua aggota dewan melakukan kegiatan reses ditempat yang sama dan sesuai dengan yang ditentukan oleh Setwan, memiliki kendala sendiri-sendiri untuk melakukan kegiatan reses tersebut. Namun apabila setiap anggota dewan itu melakukan kegiatan reses di daerah pemilihannya dengan konstituen yang hampir semua sama dengan reses-reses sebelumnya.

Maka, hal ini menjadi pandangan yang mungkin bisa dikatakan tidak merata. Karena tidak semua masyarakat juga mengetahui apa itu reses dan kegiatan seperti apa itu reses. Yang mungkin juga menjadi semakin berkurangnya pengetahuan politik di masyarakat. hal ini disampaikan oleh salah satu msyarakat Suyadi bahwa:

"Kurang pas karena yang di undang sama itu-itu aja, kalau ibu-ibu yang diundang ya yang ikut PKK yang aktif di desa, kalau yang laki-laki yang di undang ya seperti kelompok petani, Rt/Rw, dan tokoh-tokoh masyarakat. Coba mbak Tanya orang-orang disini ibu rumah tangga biasa atau bapak-bapak nya atau siapa lah yang nggak begitu aktif, coro ngunu sing nggak patek ketok ndek deso lah mbak (maksudnya orang yang tidak terlalu terlihat di desa, yang tidak terlalu ikut dalam organisasi), di tanya apa itu reses, musyrenbangdes dll itu pasti nggak ada yang tau."

[9] Muhaimin, *Wawancara,*Jombang, 23 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang di dengar oleh setiap anggota dewan ini dalam serap aspirasi atau juga bisa dikatakan dalam lingkup komunikasi politik anggota dewan dengan masyarakat yang di hasilkan mungkin akan sama. Yang disampaikan oleh masyarakat itu belum tentu juga yang ingin disampaikan oleh masyarakat yang lainnya yang tidak pernah mengikuti kegiatan reses tersebut.

Anggota DPRD Dapil III memanfaatkan kegiatan reses ini sebagai alat komunikasi politik masing-masing anggota dewan dengan konstituennya dengan strategi yang berbeda-beda. Ada yang hanya menyerap aspirasi masyarakat, ada juga yang memberikan informasi-informasi mengenai topik yang paling baru dari pemerintahan, program-program apa yang baru dari pemerintahan atau yang lainnya, bisa dikatakan juga sebagai penyalur informasi pemerintahan kepada masyarakat.

Dari kebanyakan anggota dewan serap aspirasi ini dilakukan untuk mendengarkan keluh kesah masyarakat di daerah pemilihannya. Sebagai penampung keluh kesah masyarakat terhadap apa yang sudah terjadi di pemerintahan ini. Dan apa yang mungkin membuat nayaman dan tidak nyaman di pemerintahan ini. Hal ini disampaikan oleh masyarakat agar anggota dewan dapat melakukan trobosan dari kesulitan-kesulitan masyarakat tersebut kepada pemerintah kabupaten.

Seperti halnya program JASMAS (Jaringan Aspiasi Masyarakat). Program ini dilakukan secara personal oleh anggota dewan di daerah pemilihannya masing-masing, untuk lebih cepat melakuakan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkan apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat. Contoh dari program ini disampaikan oleh Muhaimin dari Fraksi PKB;

> "Kegiatan komunikasi itu tanpa menunggu arahan baik itu sifatnya insidental. Kalau insidental itu kan biasanya ke persoalan tunjangan atau mungkin masalah sosial contohnya ada anak yang memang terlantar yang tidak mempunyai sanak saudara itu sakit, nah itu kan sebuah persoalan. Misalnya membantu mereka itu kita langsung terjun tanpa menunggu persetujuan atau arahan. Jadi sifatnya melalui reses atau tidak."[10]

Ini termasuk dalam jaringan aspirasi masyarakat. Masyarakat menemui anggota dewannya secara *face to face* atau personal untuk menyampaikan apa yang jadi kebutuhannya dan keluhannya atau kesulitannya dengan tujuan agar dapat dibantu dengan lebih mudah. Namun semua yang menjadi hasil aspirasi masyarakat baik melalui reses atau jasmas tidak semuanya akan direalisasikan, terutama pada kegiatan reses.

Dalam kegiatan reses anggota dewan memiliki notulen yang mencatat semua yang menjadi pokok pembahasan dan menampung aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dalam melakukan komuikasi politik dengan masyarakat. Adapun yang menjadi pokok pembahasan dalam kegiatan reses tahun 2016 adalah:

a. Evaluasi pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2015.

b. Sosialisasi APBD Tahun 2015.

c. Sosialisasi tentang pengisian perangkat desa yang sudah habis masa jabatannya.

[10] Muhaimin, *Wawancara,* Gedangan Mojowarno, 25 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Membahas potensi daerah pemilihan yang dikunjungi

Di dalam dapil III yang menjadi potensi dalam serap aspirasi di kegiatan reses lebih kepada infrastruktur yang ingin di perbaiki dan dirikan setiap desa atau kecamatan. Contoh dari hasil usulan yang disampaikan di desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam adalah perbaikan jalan penghubung di beberapa dusun. Di Kecamatan Mojowarno perbaiakan jalan di desa Gedangan, pengadaan tiang listrik dan pembangunan TK, ada juga yang menyampaikan keluhan-keluhan di dalam serap aspirasi tersebut seperti di desa Japanan megeluhkan lambannya pencairan dana desa Japanan, Petani megeluhkan lambannya pemerintahan daerah melakukan recoveri dan rehabilitasi penanganan kerusakan infrastruktur pertanian seperti saluran pembuang, embung, DAM yang saat ini banyak yang rusak, padahal ini merupakan darana penting untuk petani, sehingga menjaadi hal yang menyulitkan petani didesa japanan dalam konteks infrastruktur. Dari 4 kecamatan dapil III memiliki usulan yang hampir sama, karena potensi infrastruktur yang kurang memadahi di dapil III.

Setelah disampaikan dan dilaporkan hasil reses tersebut akan di jadikan pokok-pokok pikiran dari setiap fraksi mana yang sekiranya itu sesuai dengan agenda yang sudah di tetapkan oleh bupati maka akan di anggrakan. Tapi jika itu dari jasmas seperti yang di sampaikan oleh Muhaimin ;

"Ya memang tidak semua direalisasikan untuk satu atau dua dari program tersebut menurut saya sangat efektif sekali jadi istilahnya itu kita melakukan 6 kali reses dengan 6 titik setiap titik itu ada ranking persoalan, ketika ada rangking persoalan sepanjang itu memang terkait dengan masalah dana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> maka kita akan sesuai kan dengan ketersediaan dana, kalau misalnya dana mencukupi ya kita laksanakan misalnya pembangunan infrastruktur jalan atau sekolahan, padu nya daerah itu gampang nanti kita skala prioritaskan dari 6 titik tadi. Yang kedua terkait dengan skala persoalan. Kalau skala persoalan itu tidak harus dengan uang tetapi juga dengan tenaga kita dan pikiran kita itu bisa dilaksanakan kalau kita bisa mewarnai kebijakan pemerintah daerah contohnya bupati yang memiliki kebijakan itu kita hanya melaksanakan itu mereka yang menyampaikan. Jadi kita sampaikan ketika kita rapat dan mengajukan pendapat misalnya terkait dengan tadi yang sudah saya sampaikan pada pendidikan dll ketika memang ada anak terlantar dalam satu RT itu berapa, dalam satu desa itu berapa,"[11]

Komunikasi ini dilakukan dengan tahap-tahap yang sudah ditentukan. Masyarakat sebagai orang yang punya hak katas kesejahteraannya di Negara ini, yang tidak bisa langsung menyampaikan kepada pemerintahan. Maka, dengan adanya lembaga legislatif atau parlemen sebagai lembaga politik formal dalam supra struktur politik memiliki fungsi komunikasi politik. Yang menjadi wakil dari setiap lapisan masyarakat di kursi pemerintahan.

Lembaga legislatif harus selalu mendampingi masyarakat dalam konteks apa pun, untuk terpenuhinya masyarakat yang sejahtera. Untuk mencapai suatu tujuan masyarakat maka harus ada komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Ada konsep dari komunikasi itu sendiri yang sudah di paparkan dalam Bab II yaitu, yang pertama konsep yang ada kaitannya dengan bangun (struktur) kerja, dan yang kedua konsep yang memusatkan perhatian pada berbagai arus dan proses. Yang dimaksud dalam hal ini yang sudah disampaikan di dalam buku Andrinov A. Chaniago adalah legislatif memiliki fungsi legislasi, budgeting, dan controlling. Anggota bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang memiliki kewajiban yang

[11] Muhaimin, *Wawancara*, Jombang, 25 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah di tetapkan salah satunya adalah menyerap aspirasi masyarakat melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Hal ini sebagai proses lembaga legislatif dalam melakukan fungsi dan kewajibannya.

Dan pada tahun ini 2017 anggota dewan Kabupaten Jombang tidak melakukan kegiatan reses di daerah pemilihannya, karena menurut masing-masing anggota dewan dana yang ditetapkan tidak sesuai dengan pengeluaran di lapangan. Namun dari berbagai anggota dewan ingin melakukan kegiatan serap aspirasi atau tidak di lakukan sesuai kemauannya. Dalam masalah ini anggota Dapil III tetap melaksanakan kegiatan walaupun tidak serap aspirasi tapi hanya mendatangi undangan dari desa-desa tertentu. Dan untuk mengisi agenda ini agar tidak terjadi kecurigaan terhadap masyarakat anggota dewan juga melakukan BIMTEK PROLEGDA (Bimbingan Teknologi Program Legislatif Daerah). Namun ada juga anggota dewan yang tetap melakukan serap aspirasi meskipun tidak ada serap aspirasi di tahun ini. Karena menurutnya serap aspirasi itu dilakukan kapan pun dan dimanapun walaupun tidak dalam kegiatan reses.

Komunikasi yang dilakukan oleh anggota dewan dengan konsituen ini juga memiliki kendala-kendala salah satunya adalah batasan wilayah politik, dalam arti wilayah dimana anggota dewan memiliki suara terbanyak, dan apabila di luar wilayah politik nya anggota dewan melakukan komunikasi ini berbeda dengan wilayah yang tidak memiliki suara, sehingga dalam kegiatan reses ini ada perbedaan anggota Dewan satu dengan yang lainnya dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan. Perbedaan dalam kinerjanya perbedaan dalam menanggapi masyarakatnya pada waktu reses dan perbedaan pendekatan kepada konstituen.

Hal ini membuat masyarakat membandingkan bagaimana jika anggota DPRD lain yang mengunjungi untuk reses. Seperti yang di sampaikan oleh salah satu masyarakat Widiyanti:

> "Terkadang ada anggota DPRD yang datang tidak mendengarkan keluhan masyarakat tetapi cuma kita yang mendengarkan bapak dewan berbicara, kita hanya lapor ke kepala desa saja setelah itu untuk kelanjutannya tidak tau bagaimana dengan laporannya".[12]

Masyarakat memiliki pengetahuan yang minim tentang bagaiamana reses itu dilaksanakan dan apa itu reses. Reses yang seharusnya menjadi pusat informasi masyarakat dan menjadi tempat keluh kesah masyarakat di lingkungannya menjadi hal yang di anggap masyarakat bukan apa-apa karena datang hanya untuk mendengarkan anggota dewan.

Namun ada juga yang mengerti bahwa reses sangat penting bagi kalangan masyarakat untuk mengetahuinya. Oleh sebab itu, anggota dewan seharusnya mengundang masyarakat yang belum pernah mengikuti reses daripada orang-orang yang sudah biasa diundang. Masyarakat ini berpendapat bahwa anggota dewan itu berbeda-beda dalam melakukan kegiatan reses nya karena terkadang kalau bukan orang yang memilihnya dianggap tidak begitu

[12] Widiyanti, *wawancara,* Jombang, 19.20 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpengaruh sehingga hanya mengundang orang-orang yang menurutnya itu sangat berpengaruh dalam pemilihan selajutnya.

Dari yang disampaikan masyarakat ini menjadi salah satu bentuk kendala anggota dewan, apabila anggota dewan lain yang melaksanakan komunikasi di luar wilayah politiknya, maka disitu akan menjadi perbedaan tersendiri bagi anggota dewan. Adapun kendala anggota dewan melakukan reses selain anggaran dalam proses komunikasi politik nya yaitu, wilayah politik, statemen masyarakat yang selalu menganggap kalau ketemu anggota dewan akan dapat makan minum maupun yang lainnya, dan keadaan masyarakatnya.

Namun, anggota dewan memiliki cara bagaimana memaksimalkan komunikasi meskipun ada kendala-kendala nya dalam melakukan komunkasi dengan konstituen, anggota dewan tetap mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang perlu untuk diperjuangkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan di atas maka penelitian ini dapat di tarik kesimpilkan:

Pertama Program anggota DPRD dapil III Kabupaten Jombang dalam memanfaatkan kegiatan reses ini prosesnya akan memunculkan suatu kebijakan atau rancangan program daerah. Dari sekian banyak yang disampaikan masyarakat kepada anggota dewan pada saat kegiatan reses di mulai, anggota dewan sebisa mungkin menampung semua aspirasi masyarakat. Ada dua program anggota dewan disini yang pertama reses dan yang kedua jasmas (jaaringan aspirasi masyarakat). Kedua program tersebut berbeda cara nya meski sama-sama menyerap aspirasi masyarakat, dalam kegiatan reses dilakukan secara kelompok atau masa yang berarti ada forum antara masyarakat dengan anggota dewan, dalam kegiatan reses tersebut tersebut memunculkan suatu aspirasi masyarakat yang akan menjadi laporan dan menjadi skala prioritas bagi anggota dewan untuk menjadi acuan kebijakan dan akan direalisasikan. Anggota dewan memaksimalkan reses ini dapat dilakukan dengan baik apabila anggarannya juga sesuai. dalam program jasmas sendiri anggota dewan juga harus berusaha keras agar itu dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

direalisasikan. Komunikasi antara anggota dewan dengan konstituen ini lah yang sangat penting bagi pemerintah, agar mengetahui bagaimana tingkat kesejahteraaan masyarakat di daerah yang mungkin juga sulit di jamah oleh pemerintah pusat.

Kedua, Anggota DPRD Kabupaten Jombang Dapil III menjadikan kegiatan reses sebagai media komunikasi politik. Dalam penelitian ini melihat anggota DPRD dapil III Kabupaten Jombang dari masing-masing anggota DPRD memliki cara yang berbeda-beda dalam melakukan komunikasi dengan konstituennya. Dari Ikhnan Fraksi HANURA yang lebih memilih konstituenya dari kalangan partai mana pun selain konstituen juga bisa menilai bagaimana kinerja beliau juga agar tdapat mendengar keluhan dan membagi informasi tidak hanya menetap dengan konstituen yang sama, hal serupa dilakukan oleh anggota dewan dari Fraksi PKB yaitu Muhaimin, tetapi anggota dewan yang ini lebih memilih kepada konstituen yang memilihnya saja berbeda dengan Bapak Ikhnan, begitu Juga dengan Pak Totok dari fraksi PDI-P yang background nya dulu seorang kepala desa sehingga sedikit banyak ia lebih sering mengadakan di kantor desa dengan konstituen yang mungkin kebanyakan juga sama orangnya dari sebelum-sebelumya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan, ada beberapa pokok pikiran yang dapat diajukan sebagai saran-saran dari hasil penelitian ini. Yang pertama program serap aspirasi tetap dalam prosedur yang sudah ditetapkan, yang kedua dilakukan komunikasi dua arah dalam kegiatan reses. Meski dalam pendanaan yang minim menurut anggota Dewan yang belum ditetapkan oleh Peraturan Bupati, begitu juga dengan masyarakat lebih bisa menyadari bentuk dari kegiatan reses itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, novel. *Peradaban komunikasi politik*, Bandung: remaja rosdakarya 1999.

Ardial, *Komunikasi Politik*, Jakarta Barat: PT Indeks 2010.

Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka : 2008.

Chaniago . A. Andrinof. *Teori Politik Modern.* Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

Dunn, William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Yogyakarta: Gajah mada University Press, 2000.

E. Kristi, Purwandari, *Pendekatan Kualitatif Untuk Manusia*, Jakarta: LPSP3, 2005.

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Husaini, Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju 1990.

Moleong, Lexy. J, *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

Muhajir, Noeng. *Metodologi Peneltian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996.

Nasution, *Metode Research*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996.

Nimmo, Dan, *Komunikasi Politik, komunikator, pesan, media,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Sastroadmodjo, Sudijono, *Perilaku Politik*, Semarang; IKIP Semarang Press, 1995.

Saryono, dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif dalam bidang kesehatan, Yogyakarta: Nuha Medika : 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Subiakto Henry, Rachmah Ida. *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi,* Edisi Kedua, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.

Syaukani, Affan Gaffar, Ryias Rasyid.M, *Otonomi Daerah Negara Kesatuan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000.

Tatang, M.Amirin, *Menyusun Perencanaan Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Widjaja, A.W. *Komunikasi : Komunikasi dan Hubungan Masyarakat,* Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Sumber Jurnal dan Skripsi

Hanida P. Rozidetano, *Bentuk Komunikasi Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Konstituen di Daerah Pemilihannya,* (Skripsi, Tidak Diterbitkan, FISIP, Universitas Andalas). Tersedia di (repository.unand.ac.id > Rozodetano),(diunduh pada 03 Januari 2017, pukul 08.58).

Sofyan Arief, SH, "Kinerja DPRD Dalam Melaksanakan Kekuasaan Legislasi *(Study Di DPRD Kota Malang)*" *Jurnal Legality Vol 20 No.2*, hal 3, (Artikel Online), tersedia di: *ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/300/313*; diunduh pada 19 Januari 2017, Pukul 21.11 WIB.

Qory K. Putri, M. Y. Tiyas Tinov, "Efektifitas Reses Anggota DPRD Kab. Bengkalis Periode 2009-2014 (Studi Dapil I Kecamatan Bantan, Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Rupat, dan Kecamatan Rupat Utara)" *Jurnal Online Mahasiswa Vol 1, No. 1,* (Februari 2014), hal 1. (Artikel Online),
tersedia di: *jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/2183*; diunduh pada 19 januari 2017 Pukul 20.15 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Dan Internet

http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/keadaan-geografis.html (diunduh pada hari kamis, tanggal 30 maret 2017, Pukul 10.15WIB).

https://jombangkab.bps.go.id/index.php/linkTabelStatis (diunduh pada hari kamis, tanggal 30 Maret 2017, Pukul 10.45 WIB).

http://www.academia.edu/6042949/Sistem_Pemilu_dan_Pembagian_Dapil_yg_Ideal_-_Totok_Daryanto
(diakses pada hari Minggu, Tanggal 24 September 2017, pukul 19.13 WIB).

Jombang Times.com (diakses pada hari Minggu Tanggal 06 Agustus 2017, pukul 17.52 WIB).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pdf.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 40 dan 42 ayat 1.

Profil DPRD Kabupaten Jombang masa keanggotaan 2014-2019.

Portal Kabupaten Jombang (di akses pada hari Selasa Tanggal 25 Mei 2017, pukul 20.25 WIB).

Statistik Daerah Kabupaten Jombang (di akses pada hari Minggu, Tanggal 1 Oktober 2017, pukul 15.44 WIB).

Tata Tertib Dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang Masa Jabatan 2014-2019, Sekertariat DPRD Kabupaten Jombang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id